

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APABD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	2	29,974,000	1,805,000.00	6.02	16.01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		unit	30	4	31,314,500	2,500,000	7.98	9.14
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Presentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b>	%	32	0	875,284,180	31.33	0.00	0.00
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang diterapkan</b>	dokumen	8	0	875,284,180	5	0.00	0.00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	umlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	7	0	94,775,000	0	0.00	0.00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	7	0	110,472,000	0	0.00	0.00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	13	0	629,220,000	0	0.00	0.00
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	12	0	14,239,180	0	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	3	0	26,578,000	0	0.00	0.00
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	%	60	30	2,596,791,204	739,829,900	28.49	42.41
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kegiatan, Perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</b>	%	60	30	1,986,531,200	648,282,300	32.63	49.35
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	2	1	1,986,531,200	648,282,300	32.63	49.35
	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi EGovernment</b>	%	60	14	610,260,004	91,547,600	15.00	19.83
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan	dokumen	2	0	200,000,000	0	0.00	0.00

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APABD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1	0	140,000,004	0	0.00	0.00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	4	2	242,000,000	91,547,600	37.83	50.00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	3	0	28,260,000	0	0.00	0.00
	<b>Total</b>					9,334,531,820	3,793,561,883	40,64	47,15

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Statistik adalah sebesar **33,33%** atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.24. Urusan Statistik

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 43.833.180,00 dan terealisasi 0%. Adapun realisasi anggaran Urusan Statistik selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.27 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APABD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	%	100	0	43,833,180	100	0.00	0.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah	37	0	43,833,180	37	0.00	0.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	4	0	43,833,180	0	0.00	0.00
	<b>Total</b>					43,833,180	100	0.00	0.00

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Statistik adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.25. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi 0%. Adapun realisasi anggaran Urusan Persandian selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.28 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Presentase Sistem Elektronik/Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah</b>	%	25	0	30,000,000	25	0.00	20.00
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah SE yang menerapkan SMK dan diamankan sertifikasi elektronik atau aplikasi penyandian</b>	Sistem elektronik	3	0	30,000,000	3	0.00	20.00
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	4	0	0	0	0	0
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah	38	0	30,000,000	0	0.00	20.00
<b>TOTAL</b>						<b>30,000,000</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Persandian adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.26. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.17.774.566.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.619.091.481,00 atau 20,36%. Adapun realisasi anggaran selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.29 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>12,00</b>	<b>5.798.492.658</b>	<b>2.689.975.071</b>	<b>46,39</b>	<b>46,39</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	<b>Dokumen</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>251.524.700</b>	<b>58.601.440</b>	<b>23,30</b>	<b>23,30</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	1	230.257.050	50.217.440	21,81	21,81
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	Dokumen	2	0	3.277.650	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	Dokumen	2	0	4.329.600	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	4.387.500	4.387.500	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD yang disusun	Dokumen	2	0	2.989.400	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	2	2	1.996.500	1.996.500	100,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3		4.287.000	2.000.000	46,65	46,65
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3.998.761.269</b>	<b>2.078.472.815</b>	<b>51,98</b>	<b>51,98</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	3	3.884.093.069	1.977.348.698	50,91	50,91
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	3	1	7.491.700	3.097.500	41,35	41,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	104.980.000	98.026.617	93,38	93,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Laporan	1	0	2.196.500	0	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>		<b>93.440.000</b>	<b>37.154.983</b>	<b>39,76</b>	<b>39,76</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Stell	30	28	18.000.000	18.000.000	100,00	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Kegiatan	7		75.440.000	19.154.983	25,39	25,39
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>230.984.239</b>	<b>99.270.734</b>	<b>42,98</b>	<b>42,98</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	11	2	6.505.040	3.985.000	61,26	61,26
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Buah	39	6	59.780.650	29.987.600	50,16	50,16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	0	18.700.580	4.500.000	24,06	24,06

No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	OK	20	6	145.997.969	60.798.134	41,64	41,64
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>606.704.509</b>	<b>259.306.250</b>	<b>42,74</b>	<b>42,74</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	29	7	197.409.847	68.806.250	34,85	34,85
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Unit	1	1	233.498.000	190.500.000	81,59	81,59
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Buah	22	0	175.796.662	0	0,00	0,00
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>337.266.864</b>	<b>112.874.192</b>	<b>33,47</b>	<b>33,47</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	6	141.324.344	39.720.292	28,11	28,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	11	6	195.942.520	73.153.900	37,33	37,33
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>279.811.077</b>	<b>44.294.657</b>	<b>15,83</b>	<b>15,83</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	unit	6	2	49.942.997	26.593.797	53,25	53,25
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	6	30.050.000	11.900.000	39,60	39,60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	199.818.080	5.800.860	2,90	2,90
II	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan</b>	<b>Persen</b>	<b>4,1</b>	<b>2,01</b>	<b>292.387.660</b>	<b>47.436.300</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>
8	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>292.387.660</b>	<b>47.436.300</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	4	1	109.886.949	2.380.000	2,17	2,17
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	unit	1	1	32.547.350	14.715.600	45,21	45,21
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan	Orang	2	0	50.000.000	-	0,00	0,00
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan kabupaten/kota dari seluruh	Orang	4	2	99.953.361	30.340.700	30,35	30,35



No	URAIAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kecamatan							
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	60	7	11.368.591.109	852.499.610	7,50	11,84
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Kegiatan	2	1	5.720.869.970	257.508.370	4,50	13,13
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Unit	5	2	5.720.869.970	257.508.370	4,50	13,13
10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang diselenggarakan dan mengikuti kejuaraan	Kegiatan	1	1	1.486.889.266	123.904.500	8,33	8,33
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	32	4	1.486.889.266	123.904.500	8,33	8,33
11	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi yang Dibina	Kegiatan	2	1	3.640.132.503	471.086.740	12,94	12,94
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	360	5	3.504.926.503	459.220.540	13,10	13,10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	5	1	135.206.000	11.866.200	8,78	8,78
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi Yang Dibina dan Dikembangkan	Kegiatan	2	0	520.699.370	-	0,00	0,00
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	4	0	145.638.750	0	0,00	0,00
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	3	0	375.060.620	0	0,00	0,00
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	Persen	9,4	3,69	315.094.573	29.180.500	9,26	9,26
13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kegiatan	10	2	315.094.573	29.180.500	9,26	9,26
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	8	0	249.999.873	0	0,00	0,00
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	2	2	65.094.700	29.180.500	44,83	44,83
<b>TOTAL</b>						17.774.566.000	3.619.091.481	20,36	23,14

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebesar 27,99% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.27. Urusan Kearsipan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.190.923.086,00 terealisasi sebesar Rp.56.957.652,00 atau 29,83%. Adapun realisasi anggaran pada urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.30 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase pelaksanaan pelestarian naskah kuno milik Darah Kabupaten/Kota</b>	nilai	26	15	42.817.350	12.764.974	29,81	35,07
10	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelestarian naskah kuno milik Darah Kabupaten/Kota</b>	eksemplar	1	1	42.817.350	12.764.974	29,81	35,07
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	30	0	9.072.350	0	0,00	7,53
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	1	1	33.745.000	12.764.974	37,83	42,48
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupate/Kota</b>	%	10	3	139.219.736	44.192.678	31,74	54,61
11	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Daerah Kabupate/Kota</b>	arsip	3	1	51.596.610	5.936.000	11,50	39,85
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	berkas	375	0	11.320.000	0	0,00	0,00
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	190	0	10.500.000	0	0,00	100,00
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	20	7	29.776.610	5.936.000	19,94	33,79
12	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	arsip	20	13	67.466.126	31.224.678	46,28	71,42
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	20	13	67.466.126	31.224.678	46,28	71,42
13	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	pengguna	3	1	20.157.000	7.032.000	34,89	36,16
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna	3	2	12.032.000	7.032.000	58,44	60,57

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	10	0	8.125.000	0	0,00	0,00
V	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	nilai	50,5	0	7.887.000	0	0,00	0,00
14	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase pelaksanaan penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	nilai	51,5	0	7.887.000	0	0,00	0,00
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	1	0	4.767.000	0	0,00	0,00
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	1	0	3.120.000	0	0,00	0,00
VI	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	nilai	50,5	0	999.000	0	0,00	0,00
15	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah surat izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota</b>	arsip	1	0	999.000	0	0,00	0,00
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	1	0	999.000	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>					190,923,086	56,957,652.00	29.83	

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Kearsipan adalah sebesar 21,92% atau masuk kriteria **Sangat Tinggi**.



## 2.28. Urusan Perpustakaan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.6.011.676.914,00 terealisasi sebesar Rp,2.983.556.464,00 atau 49,63%. Adapun realisasi anggaran pada urusan Perpustakaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.31 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	%	97	46	5.502.526.333	2.830.594.698	51,44	54,36
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	%	97	46	40.186.250	14.696.305	36,57	84,60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	3	33.394.000	13.536.805	40,54	96,92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	2.121.750	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	1.878.500	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1.159.500	1.159.500	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	1.159.500	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	246.000	0	0,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	16	16	227.000	0	0,00	100,00
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	%	97	53	4.365.129.631	2.461.004.523	56,38	57,83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	31	31	4.233.632.581	2.394.448.427	56,56	57,75
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	330	165	105.797.000	45.357.226	42,87	53,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	25.456.550	21.198.870	83,27	91,25

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	0	243.500	0	0,00	0,00
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	%	97	54	67.348.000	37.443.559	55,60	56,57
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	18.600.000	18.600.000	100,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	3	48.748.000	18.843.559	38,66	40,00
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum</b>	%	97	70	190.312.790	63.601.301	33,42	44,69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	6.976.551	2.957.751	42,40	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	45.497.780	15.987.005	35,14	50,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	10.000.459	5.883.013	58,83	60,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	20.020.000	8.489.500	42,41	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	1	1	107.818.000	30.284.032	28,09	39,69
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>Persentase peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	97	25	285.163.878	71.135.902	24,95	27,81
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	0	14.985.000	0	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	6	2	50.567.238	11.769.752	23,28	39,42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	1	219.611.640	59.366.150	27,03	27,03
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	97	35	373.406.984	140.577.108	37,65	49,87
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	0	1.050.000	0	0,00	4,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	172.195.184	58.867.022	34,19	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	200.161.800	81.710.086	40,82	50,00
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	%	97	27	180.978.800	42.136.000	23,28	24,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	32.193.250	4.850.000	15,07	15,07

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4	0	46.578.250	3.261.000	7,00	7,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	36	11	21.354.500	5.275.000	24,70	31,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	80.852.800	28.750.000	35,56	36,35
II	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>	nilai	26		<b>509.150.581</b>	<b>152.961.766</b>	<b>30,04</b>	<b>32,89</b>
8	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengujung ke perpustakaan daerah</b>	nilai	27		<b>493.898.158</b>	<b>149.181.766</b>	<b>30,20</b>	<b>32,98</b>
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	1	0	17.500.000	0	0,00	12,86
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perustakaan	44	15	5.400.000	900.000	16,67	16,67
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan SNP	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perustakaan	70	16	4.500.000	900.000	20,00	20,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	70	30	41.152.483	15.999.732	38,88	47,35
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6	2	314.918.075	115.873.112	36,79	38,22
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	2788	929	110.427.600	15.508.922	14,04	17,20
9	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	nilai	26	6	<b>15.252.423</b>	<b>3.780.000</b>	<b>24,78</b>	<b>29,85</b>
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	25	6	15.252.423	3.780.000	24,78	29,85
	<b>TOTAL</b>					<b>6.011.676.914</b>	<b>2.983.556.464</b>	<b>49,63</b>	<b>52,39</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Perpustakaan adalah sebesar 23,71% atau masuk kriteria **Sangat Tinggi**.

## 2.29. Urusan Pariwisata

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.8.651.672.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.198.202.564,00 atau 36,97%, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,43% Adapun realisasi anggaran urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.32 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>4.919.795.699</b>	<b>2.739.139.750</b>	<b>55,68</b>	<b>61,96</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>98.526.200</b>	<b>47.960.424</b>	<b>48,68</b>	<b>79,84</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	57.625.000	30.897.400	53,62	98,28
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1.920.000	-	0,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		1.920.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.275.000	1.275.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		1.275.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	33.511.200	14.788.024	44,13	53,22
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	1	1.000.000	1.000.000	100	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4.202.477.430</b>	<b>2.450.365.377</b>	<b>58,31</b>	<b>60,46</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	4.150.323.430	2.416.253.377	58,22	59,97

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	4.000.000	4.000.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	48.154.000	30.112.000	62,53	100
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>		<b>21.880.250</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		21.880.250	-	0,00	0,00
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>33.780.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>49,88</b>	<b>50,00</b>
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	3	2	33.780.000	16.850.000	49,88	50,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30.892.000</b>	<b>29.166.610</b>	<b>94,41</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	18.600.000	18.600.000	100	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	2	12.292.000	10.566.610	85,96	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>		<b>143.775.041</b>	<b>59.413.799</b>	<b>41,32</b>	<b>43,95</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.068.262	1.566.100	51,04	65,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25.000.810	11.999.650	48,00	56,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		5.695.969	-	0,00	47,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	5	110.010.000	45.848.049	41,68	43,18
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>103.374.876</b>	<b>21.747.000</b>	<b>21,04</b>	<b>66,07</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	30	21.749.895	21.747.000	99,99	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	81.624.981	-	0,00	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>237.099.902</b>	<b>99.338.540</b>	<b>41,90</b>	<b>52,74</b>



KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	98.345.775	40.172.964	40,85	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	138.754.127	59.165.576	42,64	54,68
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>47.990.000</b>	<b>14.298.000</b>	<b>29,79</b>	<b>33,97</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	19.001.050	10.038.000	52,83	59,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1		17.418.950	-	0,00	28,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	14	11.570.000	4.260.000	36,82	50,13
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Prosentase Obyek Wisata Baru yang dikembangkan</b>	<b>%</b>	<b>6</b>		<b>1.526.428.359</b>	<b>178.532.324</b>	<b>11,70</b>	<b>14,62</b>
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Wisata Baru</b>	<b>Obyek</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1.526.428.359</b>	<b>178.532.324</b>	<b>11,70</b>	<b>14,62</b>
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1		18.233.000	-	0,00	0,00
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1		425.701.352	-	0,00	0,00
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	1	1.082.494.007	178.532.324	16,49	21,61
	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>0,45</b>	<b>847.920.667</b>	<b>251.239.442</b>	<b>29,63</b>	<b>40,65</b>
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>Event</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>847.920.667</b>	<b>251.239.442</b>	<b>29,63</b>	<b>40,65</b>
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1	92.791.000	31.975.048	34,46	39,39
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negei Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	1	515.129.667	212.357.174	41,22	58,15

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1		240.000.000	6.907.220	2,88	3,58
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif</b>	%	5		<b>130.504.806</b>	<b>13.948.024</b>	<b>10,69</b>	<b>12,83</b>
	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Orang</b>	<b>50</b>		<b>130.504.806</b>	<b>13.948.024</b>	<b>10,69</b>	<b>12,83</b>
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2	6	47.319.200	13.948.024	29,48	35,39
	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	10	9	83.185.606	-	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase Peningkatan SDM Perekraf</b>	%	5		<b>1.227.022.469</b>	<b>15.343.024</b>	<b>1,25</b>	<b>14,35</b>
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah Sumberdaya Manusia Pariwisata Ekonomi Yang mengikuti Pelatihan Dan Sertifikasi</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>43</b>	<b>1.227.022.469</b>	<b>15.343.024</b>	<b>1,25</b>	<b>14,35</b>
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	15		35.699.650	2.923.200	8,19	20,22
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	150	70	823.142.800	12.419.824	1,51	23,64
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dokumen	2		340.930.119	-	0,00	0,00
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	2		27.249.900	-	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>					<b>8.651.672.000</b>	<b>3.198.202.564</b>	<b>36,97</b>	<b>45,43</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pariwisata adalah sebesar 19,60% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.30. Urusan Pertanian

### Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.55.104.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.734.083.531,00 atau 26.74%, sedangkan realisasi fisik sebesar 28.36%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.33 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>55.104.615.000</b>	<b>14.734.083.531</b>	<b>26,74</b>	<b>28,36</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase cakupan layanan penunjang urusan SKPD</b>	<b>95</b>	<b>%</b>		<b>25.772.012.729</b>	<b>10.918.490.525</b>	<b>42,37</b>	<b>43,65</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>122.047.500</b>	<b>52.185.360</b>	<b>42,76</b>	<b>45,50</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1	80.370.000	41.837.860	52,06	55,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1		1.960.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1		2.800.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	2.572.500	2.572.500	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1		2.700.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	2.825.000	1.425.000	50,44	55,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2	28.820.000	6.350.000	22,03	25,00

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>22.888.771.961</b>	<b>10.037.720.548</b>	<b>43,85</b>	<b>45,11</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	144	144	22.781.688.611	9.965.758.077	43,74	45,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	6	34.547.350	14.669.924	42,46	45,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	72.536.000	57.292.547	78,98	80,00
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>121.676.020</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1,53</b>	<b>1,63</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	1	6.370.000	0	0,00	0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1		98.881.020	1.857.000	1,88	2,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	2	16.425.000	0	0,00	0,00
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>197.000.000</b>	<b>60.513.966</b>	<b>30,72</b>	<b>32,91</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	1	8.880.000	8.000.000	90,09	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pakaian	144		86.400.000	0	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	10	6	101.720.000	52.513.966	51,63	55,00
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>488.609.287</b>	<b>324.971.999</b>	<b>66,51</b>	<b>68,25</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	22.639.604	20.294.200	89,64	90,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	114.641.489	114.174.000	99,59	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1		32.450.255	10.328.430	31,83	35,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1		67.182.939	21.934.950	32,65	35,00

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	36	251.695.000	158.240.419	62,87	65,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan</b>	<b>unit</b>	<b>67</b>		<b>627.948.561</b>	<b>8.047.500</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	8		28.184.998	0	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15		108.124.977	0	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1		424.309.871	8.047.500	1,90	2,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	13		52.328.730	0	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	30		14.999.985	0	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan</b>	<b>laporan</b>	<b>3</b>		<b>1.036.982.400</b>	<b>371.928.502</b>	<b>35,87</b>	<b>37,58</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1		700.000	0	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1		270.139.000	108.926.579	40,32	45,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1		766.143.400	263.001.923	34,33	35,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>229</b>	<b>103</b>	<b>288.977.000</b>	<b>61.265.650</b>	<b>21,20</b>	<b>24,68</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	1	42.783.000	6.823.250	15,95	20,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	117	59	156.104.000	26.832.400	17,19	20,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	110	43	90.090.000	27.610.000	30,65	35,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase cakupan layanan sarana pertanian</b>	<b>%</b>	<b>50</b>		<b>8.042.985.879</b>	<b>671.523.388</b>	<b>8,35</b>	<b>10,49</b>



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah Dokumen laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	laporan	2		2.053.920.103	445.427.848	21,69	23,83
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	1		459.597.350	411.669.924	89,57	90,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	1		1.594.322.753	33.757.924	2,12	4,75
10	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan SDG Hewan/Tanaman	dok	8		2.850.549.202	195.228.502	6,85	11,20
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2		234.758.004	6.888.000	2,93	3,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dok	3		336.725.210	68.762.863	20,42	25,00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dok	3		2.279.065.988	119.577.639	5,25	10,00
11	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Keci</b>	laporan	12		49.212.350	0	0,00	0,00
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	laporan	12	6	49.212.350	0	0,00	0,00
12	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>	ton	30		100.134.700	30.867.038	30,83	35,00
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	30		100.134.700	30.867.038	30,83	35,00
13	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>	ekor	549		2.989.169.524	0	0,00	0,00
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	549		2.989.169.524	0	0,00	0,00
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase cakupan layanan pengembangan prasarana pertanian</b>	%	50		13.000.559.392	1.074.113.848	8,26	9,46

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian</b>	dok	1		849.786.700	44.013.848	5,18	10,00
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dok	1		849.786.700	44.013.848	5,18	10,00
15	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara</b>	unit	3		12.122.092.692	1.030.100.000	8,50	9,45
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	unit	9		1.799.340.000	844.422.000	46,93	50,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1		131.480.000	61.098.000	46,47	50,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	34		7.200.623.692	22.284.000	0,31	1,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	5		2.990.649.000	102.296.000	3,42	3,60
16	<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>	<b>Jumlah unit Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum yang dikembangkan</b>	lap	1		28.680.000	0	0,00	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	lap	1		28.680.000	0	0,00	0,00
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Starategis</b>	%	8		749.148.432	134.132.784	17,90	21,56
17	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penyakit Zoonosis yang terkendali</b>	lap	4		43.816.000	0	0,00	0,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Wilayah	4		43.816.000	0	0,00	0,00
18	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Check Point yang Beroperasi untuk pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</b>	lap	12	6	69.956.700	27.185.343	38,86	40,00

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	lap	12	6	69.956.700	27.185.343	38,86	40,00
19	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</b>	lap	12	6	<b>506.431.396</b>	<b>80.298.787</b>	<b>15,86</b>	<b>20,00</b>
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	lap	12	6	506.431.396	80.298.787	15,86	20,00
20	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan</b>	lap	12	6	<b>128.944.336</b>	<b>26.648.654</b>	<b>20,67</b>	<b>25,00</b>
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	lap	12	6	10.604.800	2.196.000	20,71	25,00
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	lap	12	6	118.339.536	24.452.654	20,66	25,00
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI</b>	%	95		<b>432.555.942</b>	<b>33.429.919</b>	<b>7,73</b>	<b>8,62</b>
21	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kawasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	HA	3.985	1.534	<b>432.555.942</b>	<b>33.429.919</b>	<b>7,73</b>	<b>8,62</b>
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	HA	2.490	1.269	149.180.942	33.429.919	22,41	25,00
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	HA	995	136	20.235.000	0	0,00	0,00
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	HA	500	129	13.140.000	0	0,00	0,00
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	laporan	1		250.000.000	0	0,00	0,00
VI	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase fasilitasi dan pengawasan perizinan usaha pertanian</b>	%	5		<b>36.515.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan fasiltasi dan pengawasan perizinan pertanian</b>	dok	3		<b>36.515.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	dok	4		11.725.720	0	0,00	0,00
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dok	50		13.110.000	0	0,00	0,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	dok	32		11.680.000	0	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Prosentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani</b>	<b>%</b>	<b>6</b>		<b>6.204.883.750</b>	<b>1.695.264.942</b>	<b>27,32</b>	<b>30,44</b>
<b>23</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan</b>	<b>unit</b>	<b>5</b>		<b>6.204.883.750</b>	<b>1.695.264.942</b>	<b>27,32</b>	<b>30,44</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	18		353.943.626	59.453.501	16,80	20,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	800	354	1.537.015.006	693.851.441	45,14	50,00
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	6		4.257.130.000	941.960.000	22,13	24,65
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	unit	1		6.803.118	0	0,00	0,00
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	4		49.992.000	0	0,00	0,00
	<b>Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul</b>					<b>398.445.536</b>	<b>27.933.494</b>	<b>7,01</b>	<b>8,32</b>
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase capaian penunjang perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>95</b>		<b>23.132.000</b>	<b>2.760.500</b>	<b>11,93</b>	<b>15,00</b>
<b>24</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan</b>	<b>lap</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>23.132.000</b>	<b>2.760.500</b>	<b>11,93</b>	<b>15,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	6	23.132.000	2.760.500	11,93	15,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase cakupan layanan sarana PPTU</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>296.731.271</b>	<b>25.172.994</b>	<b>8,48</b>	<b>10,00</b>
<b>25</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah ternak yang dipelihara di PPTU</b>	<b>dok</b>	<b>12</b>		<b>296.731.271</b>	<b>25.172.994</b>	<b>8,48</b>	<b>10,00</b>

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Pagu APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		Realisasi Keuangan		Real Fisik
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dok	12		296.731.271	25.172.994	8,48	10,00
X	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase peningkatan prasarana di UPT PPTU</b>	%	7,69		<b>78.582.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah prasarana yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara di UPT PPTU	unit	1		<b>78.582.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1		78.582.265	0	0,00	0,00
	<b>Rumah Potong Hewan Ruminansia</b>					<b>467.507.620</b>	<b>179.194.631</b>	<b>38,33</b>	<b>39,31</b>
XI	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Prosentase capaian penunjang perangkat daerah</b>	%	95		<b>107.481.492</b>	<b>41.800.984</b>	<b>38,89</b>	<b>21,79</b>
27	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan</b>	paket	1	1	<b>23.423.742</b>	<b>20.054.500</b>	<b>85,62</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	23.423.742	20.054.500	85,62	100,00
28	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan</b>	lap	12	6	<b>39.456.000</b>	<b>6.916.484</b>	<b>17,53</b>	<b>20,00</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	6	39.456.000	6.916.484	17,53	20,00
29	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</b>	unit	2	1	<b>44.601.750</b>	<b>14.830.000</b>	<b>33,25</b>	<b>35,00</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2	1	44.601.750	14.830.000	33,25	35,00
XII	<b>PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Prosentase Cakupan Pengawasan Pemotongan Ternak di RPH</b>	%	100	38,17	<b>360.026.128</b>	<b>137.393.647</b>	<b>38,16</b>	<b>44,53</b>
30	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterapkan</b>	lap	12	6	<b>360.026.128</b>	<b>137.393.647</b>	<b>38,16</b>	<b>44,53</b>
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	lap	12	6	360.026.128	137.393.647	38,16	44,53
Jumlah						55.104.615.000	15.113.583.531	27,43	28,36

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Pertanian adalah sebesar 3,18 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.



## 2.31. Unsur Sekretariat Daerah

### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 57.182.341.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.15.262.018.166,00 atau 26,69%, sedangkan realisasi fisik sebesar 61,47% Adapun realisasi anggaran unsur penunjang Sekretariat Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.34 Realisasi Pelaksanaan Unsur penunjang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>57.182.341.000</b>	<b>15.262.018.166</b>	<b>26,69</b>	<b>61,47</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>A</b>		<b>24.711.795.241</b>	<b>12.177.458.198</b>	<b>49,28</b>	<b>57,04</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>dokumen</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>72.551.971</b>	<b>44.167.665</b>	<b>60,88</b>	<b>171,68</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	1	59.552.171	40.542.865	68,08	97,80
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.500.050	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	2.500.050	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.999.900	1.999.900	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.999.900	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	1.999.900	1.624.900	81,25	81,25

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	8	2.000.000	-	-	41,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>dokumen</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>13.494.798.050</b>	<b>6.592.451.416</b>	<b>48,85</b>	<b>59,01</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	98	92	13.088.437.000	6.404.372.657	48,93	59,06
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	6	327.652.500	129.567.185	39,54	48,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	76.218.550	58.511.574	76,77	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme SKPD	Laporan	13	6	2.490.000	-	-	-
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan</b>	<b>dokumen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>52.800.000</b>	<b>22.877.336</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	0	51.060.000	22.877.336	44,80	44,80
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	840.000	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	900.000	-	-	-
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan dengan baik/ sesuai ketentuan</b>	<b>dokumen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>145.027.000</b>	<b>83.417.283</b>	<b>57,52</b>	<b>61,01</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	58.800.000	58.741.200	99,90	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	1.500.000	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	7.432.000	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	0	6.496.000	-	-	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	9	5	70.799.000	24.676.083	34,85	41,92
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>dokumen</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1.230.673.556</b>	<b>851.297.830</b>	<b>69,17</b>	<b>93,32</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	69.947.798	68.992.050	98,63	98,63
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	99.999.512	90.046.700	90,05	90,05
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	55.996.884	15.249.900	27,23	55,90
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	4.312.473	-	-	34,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	69.998.639	27.252.250	38,93	38,93
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	99.961.250	99.860.000	99,90	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	829.467.000	549.896.930	66,30	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	990.000	-	-	-
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>103.574.923</b>	<b>98.235.000</b>	<b>94,84</b>	<b>94,97</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	12	103.574.923	98.235.000	94,84	94,97
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>5.963.679.344</b>	<b>2.936.016.113</b>	<b>49,23</b>	<b>49,46</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1	3.500.000	1.477.000	42,20	57,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	3.780.543.744	2.056.979.888	54,41	54,45
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1	180.500.000	32.550.000	18,03	19,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	1.999.135.600	845.009.225	42,27	42,71

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan</b>	dokumen	5	3	1.134.920.590	417.514.231	36,79	36,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	Unit	21	6	196.103.660	36.555.531	18,64	18,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	5	351.752.930	48.553.700	13,80	13,80
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	73	36	87.065.000	34.155.000	39,23	39,23
	Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya					199.999.600	-	-	-
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	dokumen	3	0	469.503.810	231.931.810	49,40	49,54
	Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	1	20.931.810	15.931.810	76,11	76,11
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	1	0	15.890.000	-	-	-
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	1	1	432.682.000	216.000.000	49,92	50,08
	<b>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang difasilitasi</b>	dokuman	2	0	796.631.774	368.651.000	46,28	52,63
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	6	716.640.000	307.918.000	42,97	48,20
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Penataan Organisasi yang terlaksana dengan baik</b>	Dokumen	49	4	334.965.600	123.771.714	36,95	47,70
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	42	3	119.882.900	47.907.559	39,96	54,61
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	0	64.127.700	30.756.697	47,96	56,29

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	0	63.259.500	23.597.896	37,30	43,34
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	0	19.886.000	2.200.000	11,06	22,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	3	1	67.809.500	19.309.562	28,48	38,97
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik</b>	<b>Dokumen</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>912.668.623</b>	<b>407.126.800</b>	<b>44,61</b>	<b>58,15</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	13	18	381.583.060	168.608.400	44,19	60,97
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	6	292.593.900	154.495.000	52,80	52,80
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	6	238.491.663	84.023.400	35,23	60,20
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang teradministrasi dengan baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>31.733.661.459</b>	<b>2.905.781.884</b>	<b>9,16</b>	<b>10,07</b>
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	7	4	256.538.950	138.576.080	54,02	62,32
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	62.190.850	26.816.891	43,12	56,37
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	4	1	135.297.400	73.718.330	54,49	63,08
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	59.050.700	38.040.859	64,42	66,87
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah dokumen dan laporan hasil pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Dokumen</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>30.817.553.309</b>	<b>2.584.415.936</b>	<b>8,39</b>	<b>9,03</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	8	3	30.725.755.809	2.557.262.436	8,32	8,91
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	2	45.898.750	13.376.100	29,14	59,29



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	0	45.898.750	13.777.400	30,02	44,46
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>622.569.650</b>	<b>169.841.903</b>	<b>27,28</b>	<b>34,82</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	30	26	79.050.650	29.815.477	37,72	55,78
	Fasilitasi bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	4	2	489.000.250	125.981.426	25,76	30,48
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	30	26	54.518.750	14.045.000	25,76	43,29
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah hasil fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah yang sesuai dengan ketentuan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>36.999.550</b>	<b>12.947.965</b>	<b>34,99</b>	<b>93,79</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	15	7	34.999.800	12.323.215	35,21	93,50
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	0	1.999.750	624.750	31,24	98,75
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase kebijakan perekonomian dan Sumber Daya Alam yang tercapai</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>736.884.300</b>	<b>178.778.084</b>	<b>24,26</b>	<b>24,26</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan perekonomian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>109.287.100</b>	<b>33.665.450</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	3	0	38.932.000	9.750.000	25,04	38,55
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	6	55.355.500	22.200.450	40,11	59,79
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	0	5.000.000	525.000	10,50	49,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	2	1	4.999.800	595.000	11,90	57,80
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	2	1	4.999.800	595.000	11,90	54,80
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kebijakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>183.599.100</b>	<b>63.467.371</b>	<b>34,57</b>	<b>41,22</b>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	40.173.900	19.771.500	49,21	56,56

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	6	2	58.967.200	14.922.100	25,31	35,22
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	22	6	84.458.000	28.773.771	34,07	38,11
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan dengan baik</b>	<b>Dokumen</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>342.887.550</b>	<b>62.844.463</b>	<b>18,33</b>	<b>51,06</b>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	6	209.949.850	29.892.900	14,24	60,77
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	13	7	46.420.000	12.231.900	26,35	51,32
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	35	0	86.517.700	20.719.663	23,95	27,34
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>101.110.550</b>	<b>18.800.800</b>	<b>18,59</b>	<b>18,59</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	6	1	46.435.600	12.615.400	27,17	33,17
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	6	2	20.994.000	350.000	1,67	1,67
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Per	Dokumen	6	2	33.680.950	5.835.400	17,33	26,00
<b>Jumlah</b>						<b>57.182.341.000</b>	<b>15.262.018.166</b>	<b>26,69</b>	<b>30,82</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang Sekretariat Daerah adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.32. Unsur Sekretariat DPRD

### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 35.118.352.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.957.872.932,00 atau 42,59%. Adapun realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.35 Realisasi Pelaksanaan Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						Rp	(%)	
1	2	4	5	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	%	<b>100</b>		<b>25.766.690.410</b>	<b>11.426.515.030</b>	<b>44,35</b>	<b>47,48</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dok	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>58.297.500</b>	<b>30.354.446</b>	<b>52,07</b>	<b>77,15</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	3	2	46.652.500	28.379.446	60,83	90,20
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	0	1.500.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	0	1.500.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dok	1	1	1.975.000	1.975.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dok	1	0	1.500.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	2	1	1.490.000	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap	4	2	3.680.000	-	-	25,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dok	<b>635</b>	<b>378</b>	<b>2.978.126.258</b>	<b>1.501.504.992</b>	<b>50,42</b>	<b>52,48</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	19	2.751.524.458	1.375.362.582	49,99	51,63
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	624	358	155.486.800	68.448.152	44,02	48,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	71.115.000	57.694.258	81,13	93,17
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Dok	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23.151.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	0	23.151.400	-	-	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dok	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>84.464.000</b>	<b>48.737.301</b>	<b>57,70</b>	<b>58,56</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	0	12.600.000	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	7	5	71.864.000	48.737.301	67,82	68,82
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dok	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>383.527.052</b>	<b>138.807.947</b>	<b>36,19</b>	<b>37,12</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	33.194.488	14.410.946	43,41	45,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1	86.690.190	51.565.055	59,48	60,38
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	1	0	1.250.044	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	1	0	3.096.830	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	5	2	90.423.150	10.852.250	12,00	12,45
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	4	2	69.021.150	23.201.250	33,61	34,62
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	5	2	99.851.200	38.778.446	38,84	40,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						Rp	(%)	
1	2	4	5	7	8	9	10	11
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>45.882.880</b>	<b>9.000.000</b>	<b>19,62</b>	<b>19,62</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	1	45.882.880	9.000.000	19,62	19,62
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>1.330.944.020</b>	<b>597.860.017</b>	<b>44,92</b>	<b>51,04</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	0	262.500	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	6	323.162.160	148.328.698	45,90	52,20
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	13	7	1.007.519.360	449.531.319	44,62	50,68
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2.227.337.000</b>	<b>192.472.081</b>	<b>8,64</b>	<b>13,86</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	3	132.129.000	36.392.942	27,54	46,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	18	250.208.000	35.929.643	14,36	50,27
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	86	22	87.000.000	17.442.750	20,05	20,93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	0	1.650.000.000	48.740.100	2,95	2,96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	108.000.000	53.966.646	49,97	50,00
								-
9	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Dok</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>16.992.614.000</b>	<b>8.114.593.522</b>	<b>47,75</b>	<b>50,30</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang	30	30	16.215.824.000	7.801.547.338	48,11	50,76
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	1	0	150.000.000	-	-	-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Orang	30	25	626.790.000	313.046.184	49,94	50,55
								-
10	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Dok</b>	<b>145</b>	<b>71</b>	<b>1.642.346.300</b>	<b>793.184.724</b>	<b>48,30</b>	<b>54,82</b>
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Lap	12	3	199.963.200	81.798.528	40,91	49,98
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lap	130	65	911.924.900	523.441.533	57,40	58,68
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	3	3	530.458.200	187.944.663	35,43	50,00
								-
II	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>%</b>	<b>99</b>		<b>9.351.661.590</b>	<b>3.531.357.902</b>	<b>37,76</b>	<b>42,17</b>
11	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>dok</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>828.727.750</b>	<b>187.980.846</b>	<b>22,68</b>	<b>24,94</b>
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dok	3	0	240.101.450	114.363.144	47,63	48,86
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dok	23	5	321.126.300	73.617.702	22,92	27,82
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	dok	2	0	267.500.000	-	-	-
								-
12	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>dukumen</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>670.381.750</b>	<b>214.144.630</b>	<b>31,94</b>	<b>32,10</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	dukumen	2	0	44.335.000	-	-	-
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dukumen	2	0	33.715.000	-	-	-
	Pembahasan APBD	dukumen	8	0	518.228.000	214.144.630	41,32	41,52
	Pembahasan APBD Perubahan	dukumen	6	0	51.622.500	-	-	-
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dukumen	1	1	22.481.250	-	-	-
								-
13.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan</b>	<b>laporan</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>2.151.280.750</b>	<b>725.589.330</b>	<b>33,73</b>	<b>34,67</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
		Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
						Rp	(%)	
1	2	4	5	7	8	9	10	11
	<b>Pemerintahan</b>							
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	7	3	707.341.500	254.599.000	35,99	36,70
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	7	3	707.341.500	226.591.972	32,03	32,73
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	7	3	707.341.500	230.717.108	32,62	34,04
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	0	9.900.000	-	-	-
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	1	1	19.356.250	13.681.250	70,68	72,02
								-
<b>14.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>dokumen</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>2.140.780.000</b>	<b>483.054.968</b>	<b>22,56</b>	<b>38,11</b>
	Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	3	1	1.285.080.000	423.349.968	32,94	34,02
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	16	0	678.900.000	-	-	46,78
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	4	6	168.000.000	52.500.000	31,25	32,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	dokumen	1	1	8.800.000	7.205.000	81,88	83,00
								-
<b>15.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>453.550.000</b>	<b>149.908.283</b>	<b>33,05</b>	<b>33,92</b>
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	dokumen	1	1	11.050.000	3.300.000	29,86	30,61
	Pelaksanaan Reses	dokumen	3	1	442.500.000	146.608.283	33,13	34,00
								-
<b>16</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>77.322.000</b>	<b>57.644.220</b>	<b>74,55</b>	<b>75,67</b>
	Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	1	1	77.322.000	57.644.220	74,55	75,67
								-
<b>17</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>dokumen</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3.029.619.340</b>	<b>1.713.035.625</b>	<b>56,54</b>	<b>57,68</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	9	5	1.876.227.840	1.179.669.412	62,87	64,00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	laporan	3	0	8.000.000	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	7	3	388.616.000	211.832.897	54,51	55,13
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	6	3	749.350.500	321.533.316	42,91	44,36
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	2	0	7.425.000	-	-	-
	<b>TOTAL</b>				<b>35.118.352.000</b>	<b>14.957.872.932</b>	<b>42,59</b>	<b>46,07</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang Sekretariat DPRD adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.33. Wilayah

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Wilayah diampu oleh 6 Kecamatan yakni Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng, termasuk juga pengelolaan Dana Kelurahan di dalamnya. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang wilayah per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.36 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>KECAMATAN</b>					<b>15.134.610.000</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>54.72</b>	<b>10.505.317.030</b>	<b>5.377.085.308</b>	<b>51,18</b>	<b>51,18</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>58.778.600</b>	<b>28.566.518</b>	<b>48,60</b>	<b>48,60</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	6	57.640.600	27.428.516	47,59	47,59
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	1.138.000	1.138.000	100,00	100,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>		<b>8.521.270.281</b>	<b>4.781.685.350</b>	<b>56,11</b>	<b>56,11</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	6	8.472.098.781	4.743.528.370	55,99	55,99
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	2.000.000	1.000.000	50,00	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	46.879.000	37.156.980	79,26	79,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	1		292.500			
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum</b>	<b>laporan</b>	<b>5</b>		<b>252.863.575</b>	<b>167.196.819</b>	<b>66,12</b>	<b>66,12</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jenis	20	20	23.128.220	23.128.220	100,00	100,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	83.656.395	83.656.395	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	buah	16	16	30.251.960	30.251.960	100,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2		19.500.000	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	15	96.327.000	30.160.244	31,31	31,31
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25.899.986</b>	<b>25.899.986</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	25.899.986	25.824.250	99,71	99,71
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>		<b>853.576.630</b>	<b>359.343.335</b>	<b>42,10</b>	<b>42,10</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	18	175.163.430	57.019.607	32,55	32,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	5	678.413.200	302.323.728	44,56	44,56
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>jasa</b>	<b>4</b>		<b>792.927.958</b>	<b>14.393.300</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jasa	4	1	14.651.600	983.000	6,71	6,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	jasa	4	1	39.321.200	7.560.300	19,23	19,23
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	jasa	32	9	39.620.000	5.850.000	14,77	14,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	jasa	2		699.335.158			
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>36.73</b>	<b>38.758.200</b>	<b>14.237.054,00</b>	<b>36,73</b>	<b>36,73</b>

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen Pelaksanaan urusan pemerintah daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>300</b>	<b>5</b>	<b>38.758.200</b>			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	bulan	12	5	31.498.200	14237054	36,73	36,73
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	300		7.260.000			
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>47,12</b>	<b>59.130.000</b>	<b>27.864.000</b>	<b>47,12</b>	<b>47,12</b>
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa</b>	<b>laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26.370.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>67,88</b>	67,88
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	1	26.370.000	17.900.000	67,88	67,88
2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina di Tingkat Kecamatan</b>	<b>lembaga</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>32.760.000</b>	<b>9.964.000</b>	<b>30,42</b>	30,42
	Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakan	6		32.760.000	9.964.000	30,42	30,42
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persen</b>	<b>90</b>		<b>9.105.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>20</b>		<b>9.105.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	20		9.105.000	-	-	-
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	<b>laporan</b>	<b>20</b>		<b>4.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyelenggarann urusan pemerintah daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>4</b>		<b>4.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum	dokumen	4		4.200.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
4	5	6	7	8	9	10			
	Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan</b>	persen	100		83.509.200	27.441.164	32,86	32,86
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaa Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	dokumen	5		83.509.200	27.441.164	32,86	32,86
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12	5	36.899.200	15.650.164	42,41	42,41
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	13	3	20.130.000	6.525.000	32,41	32,41
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	6	2	6.050.000	2.958.000	48,89	48,89
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	6	2	7.260.000	2.308.000	31,79	31,79
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	13		13.170.000	-	-	-
	<b>DANA KELURAHAN</b>					<b>4.434.590.570</b>			
	<b>KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG</b>					<b>548.994.000</b>	<b>46.876.800</b>	<b>8,54</b>	8,54
VII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	100	8,54	548.994.000	46.876.800	8,54	8,54
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	laporan	2		548.994.000	46.876.800	8,54	8,54
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	paket	10	1	426.694.000	4.126.800	0,97	0,97
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	7	122.300.000	42.750.000	34,96	34,96
	<b>KELURAHAN MENDAWAI</b>					<b>640.288.590</b>	<b>89.076.350</b>	<b>13,91</b>	13,91
VIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	100		640.288.590	89.076.350	13,91	13,91

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	laporan	2	13,91	640.288.590	89.076.350	13,91	13,91
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	paket	9	1	295.341.290	15.320.000	5,19	5,19
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	7	7	344.947.300	73.758.350	21,38	21,38
	<b>KELURAHAN MADUREJO</b>					<b>650.888.716</b>	<b>142.145.000</b>	<b>21,84</b>	21,84
IX	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	100	21,84	<b>650.888.716</b>	<b>142.145.000</b>	<b>21,84</b>	21,84
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	laporan	2		650.888.716	142.145.000	21,84	21,84
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	paket	5	1	334.369.216	83.345.000	24,93	24,93
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	9	9	316.519.500	58.800.000	18,58	18,58
	<b>KELURAHAN SIDOREJO</b>					<b>625.569.000</b>	<b>312.697.410</b>	<b>49,99</b>	49,99
X	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	100	49,99	<b>625.569.000</b>	<b>312.697.410</b>	<b>49,99</b>	49,99
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	laporan	100	49,99	625.569.000	312.697.410	49,99	49,99
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/ diadakan/dipelihara	paket	9	4	409.849.000	207.523.410	50,63	50,63
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	6	6	215.720.000	63.750.000	29,55	29,55
	<b>KELURAHAN RAJA</b>					<b>566.154.907</b>	<b>170.396.300</b>	<b>30,10</b>	30,10
XI	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	100	30,10	566.154.907	170.396.300	30,10	30,10
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>	laporan	100	30,10	566.154.907	170.396.300	30,10	30,10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	paket	20	4	355.524.490	93.646.300	26,34	26,34
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	pokmas/or mas	20	20	210.630.417	76.750.000	36,44	36,44



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
	<b>KELURAHAN RAJA SEBERANG</b>					<b>703.694.359</b>	<b>90.750.000</b>	<b>12,90</b>	12,90
XII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	persen	100	26,50	703.694.359	186.455.000	26,50	26,50
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	laporan	100	26,50	703.694.359	186.455.000	26,50	26,50
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	paket	4	1	515.654.359	147.325.000	28,57	28,57
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	3	188.040.000	39.130.000	20,81	20,81
	<b>KELURAHAN BARU</b>					<b>699.000.998</b>	142.000.000	20,31	20,31
XIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	persen	100	20,31	699.000.998	142.000.000	20,31	20,31
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	laporan	100	20,31	699.000.998	142.000.000	20,31	20,31
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	1	260.438.773	49.500.000	19,01	19,01
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	11	11	438.562.225	92.500.000	21,09	21,09
	<b>TOTAL</b>					<b>15.134.610.000</b>	<b>6.536.198.660</b>	<b>43,19</b>	<b>55,12</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Arut Selatan adalah sebesar 22,76 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.37 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	persen	100	37%	3,917,269,904	2,163,806,112	55.24	55.63

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	2	54,617,000	32,920,159	60.27	47.73
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1	42,767,000	31,270,159	73.12	53.97
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	2,130,000	-	0.00	0.00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	2,240,000	-	0.00	0.00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1,340,000	-	0.00	49.63
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	1,340,000	-	0.00	0.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	4,800,000	1,650,000	34.38	48.44
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	2,783,669,254	1,510,712,114	54.27	54.35
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	22	22	2,742,770,254	1,489,527,158	54.31	54.31
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	3,000,000	1,000,000	33.33	33.33
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	34,299,000	20,184,956	58.85	62.13
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	16	6	3,600,000	-	0.00	33.33
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	dokumen	1	1	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	25	25	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
7.01.01 .2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>143,715,635</b>	<b>28,803,132</b>	<b>20.04</b>	<b>31.89</b>
7.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	4,971,070	2,488,920	50.07	50.07
7.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	40,695,893	16,344,110	40.16	40.16
7.01.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	0	4,068,672		0.00	0.00
7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	220	50	93,980,000	9,970,102	10.61	28.73
7.01.01 .2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>651,824,994</b>	<b>479,600,000</b>	<b>73.58</b>	<b>73.58</b>
7.01.01 .2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	494,870,000	465,500,000	94.07	94.07
7.01.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	14,624,994	14,100,000	96.41	96.41
7.01.01 .2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	0	142,330,000	-	0.00	0.00
7.01.01 .2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>202,480,021</b>	<b>81,100,707</b>	<b>40.05</b>	<b>40.06</b>
7.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	40,784,640	8,874,875	21.76	21.76
7.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	161,695,381	72,225,832	44.67	44.67
7.01.01 .2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>65,963,000</b>	<b>15,670,000</b>	<b>23.76</b>	<b>28.33</b>

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	28,405,000	7,980,000	28.09	38.73
7.01.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	1	30,008,000	3,000,000	10.00	10.00
7.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	3	7,550,000	4,690,000	62.12	62.12
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilayani Sesuai SOP</b>	<b>persen</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>61,698,400</b>	<b>27,917,368</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	dokumen	12	5	61,698,400	27,917,368	45.25	45.25
7.01.02 .2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	12	5	61,698,400	27,917,368	45.25	45.25
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>26,775,000</b>	<b>15,125,000</b>	<b>56.49</b>	<b>62.65</b>
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan	11	5	22,375,000	15,125,000	67.60	67.60
7.01.03 .2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	2	2	20,175,000	15,125,000	74.97	74.97
7.01.03 .2.01.0 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	1	0	2,200,000	-	0.00	0.00
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina di tingkat kecamatan	lembaga kemasyarakatan	2	1	4,400,000		0.00	37.50

KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga kemasyarakatan	1	0	2,750,000		0.00	0.00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga kemasyarakatan	1	1	1,650,000		0.00	100.00
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>4,420,000</b>			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	laporan	1	0	2,200,000			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	0	2,200,000			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	1	1	2,220,000			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	1	1	2,220,000			
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>			



KODE	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			DANA DPA-SKPD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	laporan	1	1	1,100,000			
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	laporan	1	1	1,100,000			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	persen	100	42%	46,050,000	-	0.00	47.01
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen	3	2	46,050,000	-	0.00	47.01
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	10	6	42,600,000	-	0.00	46.95
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1	1	1,650,000	-	0.00	100.00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	1	0	1,800,000	-	0.00	0.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	persen	100	75%	570,515,696	263,789,656	46.24	46.24
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	laporan	1	1	570,515,696	263,789,656	46.24	46.24
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyarakatan	2	2	4,999,450	4,999,450	100.00	100.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	1	1	356,787,876	215,273,506	60.34	60.34
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas	1	1	208,728,370	43,516,700	20.85	20.85
<b>JUMLAH</b>						<b>4,627,829,000</b>	<b>2,470,638,136</b>	<b>53.39</b>	<b>54.27</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Arut Utara adalah sebesar 33,43% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.38 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kumai</b>								
	<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>39,1</b>	<b>7.735.581.300</b>	<b>3.101.262.120</b>	<b>40,09</b>	<b>41,85</b>
	<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>20.195.085</b>	<b>9.388.660</b>	<b>46,49</b>	<b>49,44</b>
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	0	20.195.085	9.388.660	46,49	49,44
	<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>		<b>5.016.255.600</b>	<b>2.859.988.899</b>	<b>57,01</b>	<b>57,67</b>
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	43	43	4.984.816.000	2.841.573.962	57,00	57,54
	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	800	650	1.112.600	1.000.000	89,88	89,88
	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	0	30.327.000	17.414.937	57,42	78,99
	<b>7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>		<b>19.680.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	2		19.680.000	-	-	-
	<b>7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>123.803.814</b>	<b>40.083.226</b>	<b>32,38</b>	<b>47,06</b>
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	5.960.745	-	-	-
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	40.226.669	9.215.500	22,91	50,00
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	0	28.072.400	7.500.000	26,72	50,00
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	0	49.544.000	23.367.726	47,17	48,68

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	<b>7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	dokumen	1	0	1.499.999.882	-	-	0,97
	7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	0	1.499.999.882	-	-	0,97
	<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	dokumen	105	0	473.317.415	184.851.335	39,05	52,72
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	74.261.845	16.743.549	22,55	50,00
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	399.055.570	168.107.786	42,13	53,22
	<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	dokumen	8	0	582.329.504	6.950.000	1,19	2,11
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	0	65.401.494	6.950.000	10,63	11,39
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	27	0	16.928.735	-	-	-
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	499.999.275	-	-	0,96
	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP</b>	persen	88	35	999.750	-	-	45,01
	<b>7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan</b>	dokumen	500	230	999.750	-	-	45,01
	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	500	230	999.750	-	-	45,01
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	80	59	38.954.650	23.705.000	60,85	67,01

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	<b>7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>laporan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>31.454.900</b>	<b>23.705.000</b>	<b>75,36</b>	<b>76,16</b>
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	2	0	7.499.900	-	-	-
	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	23.955.000	23.705.000	98,96	100
	<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibangun</b>	<b>lembaga</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7.499.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,67</b>
	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga	2	0	7.499.750	-	-	28,67
	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7.499.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>
	<b>7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan</b>	<b>laporan</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3.740.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	4	0	3.740.000	-	-	-
	<b>7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3.759.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,97</b>
	7.01.04.2.02.01 Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	12	0	3.759.950	-	-	11,97
	<b>7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>9.998.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,25</b>
	<b>7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>dokumen</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>9.998.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,25</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	15	0	1.399.750	-	-	-
	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	5	0	799.950	-	-	-
	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	15	0	1.999.850	-	-	33,75
	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	3	0	799.950	-	-	-
	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	2	0	999.750	-	-	-
	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	2	0	599.800	-	-	-
	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dokumen	1	0	599.800	-	-	-
	7.01.06.2.01.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	1	0	799.950	-	-	-
	7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dokumen	1	0	599.800	-	-	-
	7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	2	1	799.950	-	-	56,25
	7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	laporan	1	0	599.800	-	-	-
	<b>J U M L A H</b>					<b>7.793.034.000</b>	<b>3.124.967.120</b>	<b>40,10</b>	<b>41,90</b>



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	<b>7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Candi</b>								
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>564.544.000</b>	<b>149.750.680</b>	<b>26,53</b>	<b>28,39</b>
	<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>laporan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>564.544.000</b>	<b>149.750.680</b>	<b>26,53</b>	<b>28,39</b>
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	2	0	5.408.970	-	-	-
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	36	0	472.566.629	106.055.200	22,44	22,44
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	2	0	86.568.401	43.695.480	50,48	62,60
	<b>J U M L A H</b>					<b>564.544.000</b>	<b>149.750.680</b>	<b>26,53</b>	<b>28,39</b>
	<b>01.0002 Kelurahan Kumai Hulu</b>								
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>614.642.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>2,93</b>	<b>8,79</b>
	<b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>laporan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>614.642.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>2,93</b>	<b>8,79</b>
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	2	0	9.999.950	-	-	-
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	0	476.142.250	-	-	-
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	0	128.499.800	18.000.000	14,01	42,02
	<b>J U M L A H</b>					<b>614.642.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>2,93</b>	<b>8,79</b>
	<b>01.0003 Kelurahan Kumai Hilir</b>								
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>609.212.000</b>	<b>110.917.500</b>	<b>18,21</b>	<b>21,40</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	laporan	3	0	609.212.000	110.917.500	18,21	21,40
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga kemasyar akatan	2	0	4.850.400	-	-	-
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	20	0	320.555.522	69.830.000	21,78	21,78
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/or mas	3	0	283.806.078	41.087.500	14,48	21,33
	<b>JUMLAH</b>					<b>609.212.000</b>	<b>110.917.500</b>		
	<b>TOTAL</b>					<b>9.581.432.000</b>	<b>3.403.635.300</b>	<b>35,52</b>	<b>37,68</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Kumai adalah sebesar 19,08 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.39 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>5.023.330.500</b>	<b>2.337.475.147</b>	<b>46,53</b>	<b>53,75</b>
1	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>54.557.000</b>	<b>25.173.423</b>	<b>46,14</b>	<b>64,47</b>
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	3	49.827.000	24.893.423	49,96	70,03
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	6	4.730.000	280.000	5,92	5,92
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>bulan/dok umen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3.704.760.814</b>	<b>1.879.861.521</b>	<b>50,74</b>	<b>58,51</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	6	3.648.422.814	1.857.418.372	50,91	58,80

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	6	9.760.000	3.240.000	33,20	33,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1		46.578.000	19.203.149	41,23	41,23
3	<b>Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>52.182.000</b>	<b>26.850.070</b>	<b>51,45</b>	<b>68,89</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	55	30	18.600.000	18.000.000	97	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4		33.582.000	8.850.070	26,35	51,66
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>239.504.153</b>	<b>57.092.923</b>	<b>23,84</b>	<b>30,52</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	7	18.910.680	4.691.000	24,81	24,81
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	50	5	49.999.473	15.994.000	31,99	31,99
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	19.141.000	4.000.000	20,90	20,90
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	6	151.453.000	32.407.923	21,40	31,96
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>166.664.342</b>	<b>73.000.000</b>	<b>43,80</b>	<b>65,04</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	2	156.674.342	73.000.000	46,59	62,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4		9.990.000	-	0,00	99,10
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>bulan</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>619.310.199</b>	<b>249.244.910</b>	<b>40,25</b>	<b>40,91</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	78.672.165	20.569.910	26,15	31,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	19	6	540.638.034	228.675.000	42,30	42,30
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>186.351.992</b>	<b>26.252.300</b>	<b>14,09</b>	<b>14,09</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan</b>							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	2	158.231.992	25.492.300	16,11	16,11
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	22		28.120.000	760.000	2,70	2,70
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Yang diLayani Sesuai SOP</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	50	<b>21.060.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>
1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	6	<b>21.060.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	12	6	11.590.000	-	0,00	26,92
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	12	6	9.470.000	-	0,00	59,13
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Desa dan Kelurahan Yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	50	<b>1.193.138.500</b>	<b>256.882.300</b>	<b>21,53</b>	<b>41,09</b>
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>36.350.000</b>	<b>21.190.000</b>	<b>58,29</b>	<b>66,00</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	kegiatan	1		36.350.000	21.190.000	58,29	66,00
2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina</b>	<b>desa/kel</b>	<b>17</b>	6	<b>13.642.500</b>	<b>2.640.000</b>	<b>19,35</b>	<b>23,46</b>
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	desa/kel	17	4	13.642.500	2.640.000	19,35	23,46
3	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan</b>	<b>kegiatan</b>	<b>8</b>	4	<b>11.020.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>5,08</b>
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	6	4	11.020.000	-	0,00	5,08
	<b>KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU</b>	-				<b>597.154.000</b>	<b>156.095.100</b>	<b>26,14</b>	<b>68,26</b>
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	-				<b>597.154.000</b>	<b>156.095.100</b>	<b>26,14</b>	<b>68,26</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musyawarah di kelurahan	kegiatan	1		3.000.000	-	0,00	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bak Sampah Karet yang di adakan Jumlah Pakaian Kader Posyandu yang di	Unit Unit Unit	1 1 0		418.895.800	83.100.000	19,84	79,88

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		adakan Jumlah Pakaian Kerja/Setelan Wearpack yang di adakan Jumlah Penataan Halaman Posyandu ( Penimbunan dan Pemavingan) Jumlah semenisasi Gang Sardam yang diadakan Jumlah umbul-umbul yang di adakan							
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Honorarium/Insentif Ketua RT yang di sediakan Jumlah Honorarium Kader Posyandu yang disediakan Jumlah Honorarium Petugas Pengelola Sampah/Kebersihan yang disediakan Jumlah Perlengkapan Posyandu yang Disediakan Jumlah Stetoskop yang diadakan	OB OB OB Set	96 60 60	40 30 25	175.258.200	72.995.100	41,65	41,65
	<b>KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR</b>	-				534.972.000	76.957.200	14,39	24,11
1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	-				534.972.000	76.957.200	14,39	24,11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan musyawarah di kelurahan	kegiatan	1		3.000.000	-	0,00	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah gapura selamat datang Kel. Ktw. Hilir yang diadakan Jumlah pembangunan drainase air di RT.06 Kel. Ktw. Hilir yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	buahestell ellunitmete rbuah	100 5 5 1 69 200		357.861.989	-	0,00	14,54
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah honor kader Posyandu Kel. Ktw. Hilir untuk 15 orang x 12 bulan Jumlah honor petugas pengelola sampah Kel. Ktw. Hilir untuk 3 orang x 12 bulan Jumlah honor RT Kel. Ktw. Hilir untuk 10 orang x 12 bulan Jumlah honor tenaga penganjar PAUD Kel. Ktw. Hilir untuk 3 orang x 12 bulan Jumlah pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana alam di Kel. Ktw. Hilir	OB OB OB Kegiatan	180 33 120 36 1	75 15 50 30	174.110.011	76.957.200	44,20	44,20
IV	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	50	13.405.000	2.750.000,00	20,51	65,27
1	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Pearaturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>laporan</b>	<b>6</b>	4	7.860.000	2.750.000	34,99	73,16



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	6	4	7.860.000	2.750.000	34,99	73,16
2	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	laporan	6	4	5.545.000	-	0,00	54,10
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	6	4	5.545.000	-	0,00	54,10
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan</b>	persen	80	50	28.635.000	1.100.000,00	3,84	33,70
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	dokumen	17	17	28.635.000	1.100.000	3,84	33,70
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi bidang Administrasi Tata Pemerintahan	desa	15	17	5.545.000	-	0,00	27,05
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	15	10	4.797.500	-	0,00	97,97
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	15	10	7.732.500	1.100.000	14,23	25,22
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	15	10	2.462.500	-	0,00	-
	Fasilitasi Penataan , Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dokumen	2	1	8.097.500	-	0,00	18,52
	<b>TOTAL</b>					6.279.569.000	2.598.207.447	41,38	51,23

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Kotawaringin Lama adalah sebesar 53,61 % atau masuk kriteria **Sedang**.

**Tabel 2.40 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>92</b>	<b>51</b>	<b>2.701.117.600</b>	<b>1.457.983.208</b>	<b>53,98</b>	<b>67,25</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>56.863.600</b>	<b>20.930.715</b>	<b>36,81</b>	<b>59,17</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	2	43.797.000	17.753.715	40,54	<b>50,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	2.509.800	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen	1	0	2.509.800	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	3.020.000	1.430.000	47,35	<b>70,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	1	0	3.020.000	-	-	<b>25,00</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	1	2.007.000	1.747.000	87,05	<b>91,67</b>
									-
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>1026</b>		<b>2.297.612.034</b>	<b>1.313.763.761</b>	<b>57,18</b>	<b>64,58</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bula n	20	20	2.227.644.184	1.262.338.345	56,67	<b>58,33</b>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1000	455	15.888.850	5.240.000	32,98	<b>58,33</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	50.029.000	45.525.416	91,00	<b>91,67</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan D20:F21Bulanan/Triwulana n/Seme SKPD	laporan	25	12	4.050.000	660.000	16,30	<b>50,00</b>
									-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	-	-	<b>27,08</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	0	1.350.000	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3	1	2.700.000	-	-	<b>33,33</b>
									-
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>63.702.000</b>	<b>11.870.610</b>	<b>18,63</b>	<b>20,83</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	0	14.400.000	-	-	-
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	6	5.400.000	2.860.000	52,96	<b>58,33</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	6	2	43.902.000	9.010.610	20,52	<b>25,00</b>
									-
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>45</b>		<b>65.338.050</b>	<b>27.762.080</b>	<b>42,49</b>	<b>41,67</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	3.371.520	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	21.877.080	21.877.080	100,00	<b>100</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	0	8.020.450	-	-	<b>33,33</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	45	13	32.069.000	5.885.000	18,35	<b>33,33</b>
									-
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>unit</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>9.749.996</b>	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	0	9.749.996	-	-	-
									-
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>168.857.520</b>	<b>77.556.042</b>	<b>45,93</b>	<b>108,33</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	67.218.900	35.212.334	52,38	<b>58,33</b>

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	101.638.620	42.343.708	41,66	50,00
									-
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	unit	35	0	34.944.400	6.100.000	17,46	41,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	0	25.130.400	6.100.000	24,27	41,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	0	1.750.000	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	20	0	8.064.000	-	-	41,67
									-
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP</b>	persen	85	39	71.396.400	29.601.037	41,46	50,00
9	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan</b>	dokumen	1800	650	71.396.400	29.601.037	41,46	50,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	1800	650	71.396.400	29.601.037	41,46	50,00
									-
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat</b>	persen	92	0	52.425.000	14.320.000	27,32	54,17
10	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	lap	34	0	28.800.000	12.660.000	43,96	54,17
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	0	19.100.000	12.660.000	66,28	66,67
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dok	17	0	4.900.000	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lap	17	0	4.800.000	-	-	41,67
11	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan</b>	lembaha	1	0	17.625.000	1.285.000	7,29	41,67

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	0	15.475.000	1.285.000	8,30	<b>41,67</b>
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	6	0	2.150.000			-
<b>12</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan</b>	<b>keluarga</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>375.000</b>	<b>6,25</b>	<b>20,00</b>
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	17	0	2.000.000	375.000	18,75	<b>20,00</b>
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	17	0	2.000.000	-	-	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	17	0	2.000.000	-	-	<b>41,67</b>
									-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>persen</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>11.275.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128,33</b>
<b>13</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>lap</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,33</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	lap	12	0	3.025.000	-	-	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	lap	12	0	3.275.000	-	-	<b>58,33</b>
<b>14</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>dok</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4.975.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>63,32</b>	<b>70,00</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	lap	12	0	4.975.000	3.150.000	63,32	<b>41,67</b>



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									70,00
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	persen	100	0	3.725.000	-	-	-
15	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	dok	12	0	3.725.000	-	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dok	12	0	3.725.000	-	-	-
									-
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan</b>	persen	92	19,05	26.275.000	4.970.000	18,92	72,92
13	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	dok	96	38	26.275.000	4.970.000	18,92	72,92
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dok	17	6	3.500.000	360.000	10,29	41,67
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dok	17	6	9.300.000	880.000	9,46	41,67
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dok	17	6	3.800.000	-	-	41,67
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dok	17	6	3.225.000	750.000	23,26	41,67
	Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	dok	10	6	3.150.000	2.480.000	78,73	83,33
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dok	17	8	3.300.000	500.000	15,15	41,67
									-
	<b>TOTAL</b>					<b>2.866.214.000</b>	<b>1.506.874.245</b>	<b>52,57</b>	<b>74,53</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Pangkalan Banteng adalah sebesar 20,34% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.41 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PANGKALAN LADA</b>					<b>2.422.948.000</b>	<b>1.180.992.174</b>	<b>48,74</b>	<b>52,15</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase ketercukupan administrasi perkantoran</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>50,31</b>	<b>2.320.391.750</b>	<b>1.147.121.834</b>	<b>49,44</b>	<b>37,65</b>
	<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Adminitrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>34,35</b>	<b>52.058.750</b>	<b>17.882.885</b>	<b>34,35</b>	<b>48,17</b>
	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja yang disusun	Dokumen Dokumen Dokumen	5 0 8	<b>36,85</b>	<b>46.082.000,00</b>	<b>16.982.885</b>	<b>36,85</b>	68,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	8	<b>15,06</b>	<b>5.976.750,00</b>	<b>900.000</b>	<b>15,06</b>	28,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Adminitrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>53,38</b>	<b>1.964.156.211</b>	<b>1.042.504.959</b>	<b>53,08</b>	53,08
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bul an	16	53,38	1.909.230.511	<b>1.019.079.935</b>	<b>53,38</b>	53,38
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	dokumen	120	<b>41,42</b>	<b>10.928.900</b>	<b>4.527.100</b>	<b>41,42</b>	111,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	<b>42,95</b>	<b>43.996.800,00</b>	<b>18.897.924</b>	<b>42,95</b>	61,25
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>11.988.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	75,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	paket	16	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	orang	4	-	11.988.000,00	-	-	75,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>36,61</b>	<b>80.605.648</b>	<b>29.513.406</b>	<b>36,61</b>	36,61

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9	100	6.259.238,00	<b>6.259.238</b>	<b>100,00</b>	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis	35	100	8.320.418,00	<b>8.320.418</b>	<b>100,00</b>	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	-	22.660.670,00	-	-	30,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	-	594.600,00	-	-	30,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	-	3.918.722,00	-	-	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	108	33,46	38.852.000,00	<b>13.000.000</b>	<b>33,46</b>	<b>40,00</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>40.387.472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	-	40.387.472,00	-	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>39,37</b>	<b>134.925.200</b>	<b>53.116.484</b>	<b>39,37</b>	<b>39,37</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	34,6	39.462.600,00	<b>13.653.739</b>	<b>34,60</b>	40,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	41,34	95.462.600,00	<b>39.462.745</b>	<b>41,34</b>	50,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>50</b>	<b>11,32</b>	<b>36.270.469</b>	<b>4.104.100</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	24,32	16.876.469,00	<b>4.104.100</b>	<b>24,32</b>	45,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	-	1.394.000,00	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18	-	18.000.000,00	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP	persen	0	2,45	9.185.000,00	225.000	2,45	11,67
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	IKM	90	6,03	3.730.000,00	225.000	6,03	11,67
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	90	6,03	3.730.000,00	225.000	6,03	11,67
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	persen	89	-	5.455.000,00	-	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	200	-	5.455.000,00	-	-	-
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	persen	0	72,66	20.216.750,00	14.690.000	72,66	80,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah usulan Desa kegiatan yang diakomodir dalam Renja yang pemenuhan penyediaan barang milik daerah	persen	100	72,66	20.216.750,00	14.690.000	72,66	80,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	desa	11	72,66	20.216.750,00	14.690.000	72,66	80,00
	<b>PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Presentasi Desa yang dibina dan difasilitasi	persen	88 100	-	10.294.750,00	-	-	59,38
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	2	-	4.669.750,00	-	-	51,88
	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	4	-	4.669.750,00	-	-	100,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	5.625.000,00	-	-	7,50

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	4	-	5.625.000,00	-		7,50
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>1,79</b>	<b>62.859.750,00</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1,79</b>	<b>22,06</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa kelurahan yang dibina dan difasilitasi pemenuhan penyediaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>62.859.750,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,06</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	desa	11	-	12.900.000,00	-	-	50,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa	11	-	2.355.000,00	-	-	2,50
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	desa	11	-	37.352.000,00	-	-	10,75
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	desa	3	-	10.252.750,00	-	-	25,00
	<b>TOTAL</b>					<b>2.422.948.000</b>	<b>1.180.992.174</b>	<b>48,74</b>	<b>52,15</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebesar 10,42% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.34. Urusan Pengawasan

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Pengawasan diampu oleh Inspektorat dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.17.949.997.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.941.413.241,00 atau 33,10%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,18 % Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.42 Realisasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD(Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	%	92	38,8	12.177.155.580	4.600.346.707	37,78	38,7
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	dokum en	17	5	373.485.700	36.542.688	9,78	9,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	2	1	213.059.000	33.442.688	15,70	15,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	2	0	1.455.300	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	2	0	1.344.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	2	1	1.850.000	1.850.000	100	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	2	0	2.235.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	1	54.980.000	1.250.000	2,27	2,27
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	2	98.562.400	-	-	-
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	dokum en	215	54	6.726.768.223	3.652.376.867	54,30	55,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	46	46	6.626.883.723	3.603.186.614	54,37	54,37
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	200	46	2.000.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	2	97.509.500	49.190.253	50,45	100,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD(Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	0	375.000	-	-	-
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10.000.000</b>	2.857.727	28,58	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	10.000.000	2.857.727	28,58	28,58
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>2.054.856.540</b>	<b>303.104.025</b>	<b>14,75</b>	<b>17,72</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	0	59.592.540	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	0	644.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	40	16	1.263.160.000	205.066.713	16,23	16,23
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	8	12	731.460.000	98.037.312	13,40	21,74
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</b>	<b>dokumen</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1.955.152.017</b>	<b>349.013.952</b>	<b>17,85</b>	<b>17,89</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	19.835.267	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	108.836.786	26.849.500	24,67	24,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	105.700.575	91.430.000	86,50	87,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	1	52.138.389	15.902.750	30,50	30,50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	5	1.668.641.000	214.831.702	12,87	12,87
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>604.635.400</b>	<b>207.795.533</b>	<b>34,37</b>	<b>34,37</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	6	1.050.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	149.780.800	46.038.209	30,74	30,74

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD(Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	453.804.600	161.757.324	35,64	35,64
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>452.257.700</b>	<b>48.655.915</b>	<b>10,76</b>	<b>10,76</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	2	199.312.500	43.150.315	21,65	21,65
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	67	0	54.610.000	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	198.335.200	5.505.600	2,78	2,78
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada lrbn I-V</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>67,81</b>	<b>4.733.763.390</b>	<b>1.024.783.688</b>	<b>21,65</b>	<b>55,13</b>
		Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal A	OPD	8	0				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	90	83				
		Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang diterima selama 1 tahun	%	100	100				
1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang berkualitas</b>	<b>Laporan</b>	<b>215</b>	<b>88</b>	<b>4.235.537.390</b>	<b>936.528.688</b>	<b>22,11</b>	<b>56,55</b>
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	umlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	64	4	657.567.810	159.946.450	24,32	33,97
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	umlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	76	31	1.998.054.000	58.651.100	2,94	66,94
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	39	39	285.245.580	281.707.000	98,76	100,00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	4	1	135.134.000	58.016.270	42,93	87,95
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	6	13	771.006.000	272.930.916	35,40	39,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	laporan	10	5	388.530.000	105.276.952	27,10	33,37
2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang berkualitas</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>498.226.000</b>	<b>88.255.000</b>	<b>17,71</b>	<b>43,03</b>
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	1	1	72.476.000	20.580.000	28,40	100,00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	2	425.750.000	67.675.000	15,90	33,33

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD(Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 4	%	25	0	1.039.078.030	316.282.846	30,44	41,75
		Persentase meningkatnya nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	%	3	0				
1	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Jumlah dokumen yang tersusun pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Laporan	25	0	68.930.000	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	0	30.000.000	-	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	0	38.930.000	-	-	-
2	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah laporan hasil kegiatan pendampingan,asistensi, koordinasi dan monitoring yang dilakukan	Laporan	44	20	970.148.030	316.282.846	32,60	44,72
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	10	429.228.000	152.875.508	35,62	63,01
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	2	505.120.030	146.032.338	28,91	28,91
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	37	8	35.800.000	17.375.000	48,53	48,53
	<b>TOTAL</b>					<b>17.949.997.000</b>	<b>5.941.413.241</b>	<b>33,10</b>	<b>43,18</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan pengawasan adalah sebesar 39,17% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.35. Unsur Perencanaan

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.9,719,525,550,00 dan terealisasi sebesar Rp.4,156,398,314,00 atau 43,00%. Adapun realisasi anggaran pada unsur perencanaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.43 Realisasi Unsur Perencanaan Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01. 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	%	100	54				
5.01. 01.2. 01	<b>Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	Dokumen	13	5	51,478,100	35,630,296	69.21	69.21
5.01. 01.2. 01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	1	32,714,000	30,510,446	93.26	93.26
5.01. 01.2. 01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	3,987,500	0	0	0
5.01. 01.2. 01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dok. RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	0	3,987,500	0	0	0
5.01. 01.2. 01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,868,000	2,868,000	100.0 0	100.00
5.01. 01.2. 01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dok. DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	0	2,868,000	0	0	0
5.01. 01.2. 01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian dan lltisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2,054,100	2,052,000	99.90	99.90
5.01. 01.2. 01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2	2,999,000	0	0	0
5.01. 01.2. 02 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	12	6	<b>5,259,064,474</b>	<b>2,821,809,604</b>	<b>53.66</b>	<b>53.66</b>
5.01. 01.2. 02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	35	5,214,564,374	2,790,782,985	53.52	53.52
5.01. 01.2. 02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	46	6,149,800	0	0	0
5.01. 01.2. 02.0 5	Koordinasi Penyusn. Laporan Keuangan akhir thn	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	37,196,800	31,026,619	83.41	83.41
5.01. 01.2. 02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	Laporan	12	6	1,153,500	0	0	0



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.01. 01.2. 03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1,615,700</b>	0	0	0
5.01. 01.2. 03.0 1	Penyusunan Pernc. Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	1	645,000	0	0	0
5.01. 01.2. 03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	2	970,700	0	0	0
<b>5.01. 01.2. 05</b>	<b>Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>85,936,000</b>	<b>35,659,134</b>	<b>41.49</b>	<b>41.49</b>
5.01. 01.2. 05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	21,000,000	0	0	0
5.01. 01.2. 05.0 9	Pendidikan dan pelatihan peg. Berdsrkan tgs dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	9,740,000	0	0	0
5.01. 01.2. 05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	2	0	6,496,000	0	0	0
5.01. 01.2. 05.1 1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	5	5	48,700,000	35,659,134	73.22	73.22
<b>5.01. 01.2. 06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>514,371,260</b>	<b>147,063,517</b>	<b>28.59</b>	<b>28.59</b>
5.01. 01.2. 06.0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	36,815,181	18,403,150	49.99	49.99
5.01. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	71,677,442	17,780,200	24.81	24.81
5.01. 01.2. 06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	3	23,078,810	1,990,000	8.62	8.62
5.01. 01.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1,902,720	0	0	0
5.01. 01.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	28,769,107	10,479,750	36.43	36.43
5.01. 01.2. 06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	73	47	352,128,000	98,410,417	27.95	27.95
<b>5.01. 01.2. 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b></b>	<b>83,047,458</b>	<b>6,904,200</b>	<b>8.31</b>	<b>20.00</b>
5.01. 01.2. 07.0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	5	83,047,458	6,904,200	8.31	20.00
<b>5.01. 01.2. 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>653,631,170</b>	<b>270,673,931</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	490,000	0	0	0
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	145,627,040	82,992,127	56.99	56.99
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	507,514,130	187,681,804	36.98	36.98
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>223,004,637</b>	<b>36,340,600</b>	<b>16.30</b>	<b>21.08</b>
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorg dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	41,489,997	14,679,000	35.38	35.38
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan Operasional Atau lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	64,710,000	11,236,600	17.36	17.36
5.01.01.2.08	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit	67	31	47,210,000	10,425,000	22.08	22.08
5.01.01.2.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	18,976,975	0	0	0
5.01.01.2.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	50,617,665	0	0	0
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama</b>	<b>%</b>	<b>70</b>	<b>35</b>				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan, dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	1,065,207,550	151,322,714	14.21	14.21
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	22,399,180	16,160,000	72.15	72.15
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	14,610,000	14,060,000	96.24	96.24
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kab/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	50,694,180	12,415,000	24.49	24.49
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan koordinasi musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	282	286	20,100,000	19,092,000	94.99	94.99
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R	Jumlah Dokumen Perencan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R	Dokumen	2	0	957,404,190	89,595,714	9.36	9.36

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01. 02.2. 02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Dokumen	1	0	146,999,500	22,042,153	14.99	14.99
5.01. 02.2. 02.0 1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	618	268	46,999,750	0	0	0
5.01. 02.2. 02.0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	74	48	54,999,900	21,714,553	39.48	39.48
5.01. 02.2. 02.0 3	Menyusun Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	0	44,999,850	327,600	0.73	
5.01. 02.2. 03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan</b>	Dokumen	9	5	504,570,704	184,587,762	36.58	36.58
5.01. 02.2. 03.0 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	19	9	330,000,000	122,292,912	37.06	37.06
5.01. 02.2. 03.0 2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksananya	Kerja Sama	1	0	54,570,704	0	0	0
5.01. 02.2. 03.0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	7	4	120,000,000	62,294,850	51.91	51.91
5.01. 02.2. 04	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di bidang pembangunan daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Data dalam SIPD</b>	Dokumen	1	0	34,999,750	8,163,200	23.32	23.32
5.01. 02.2. 04.0 1	Pengelolaan Data dalam sistem Informasi Pemerintah Daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	0	34,999,750	8,163,200	23.32	23.32
5.01. 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPD</b>	Dokumen	3	1				
5.01. 03.2. 01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Dokumen	1	0	299,956,722	182,773,650	60.93	60.93
5.01. 03.2. 01.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Dokumen	1	0	30,838,350	30,064,550	97.49	97.49

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01. 03.2. 01.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perangka daerah	17	9	43,531,712	17,715,600	40.70	40.70
5.01. 03.2. 01.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	2	12,748,000	350,000	2.75	2.75
5.01. 03.2. 01.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2	1	38,221,000	32,576,900	85.23	-
5.01. 03.2. 01.0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang di Koordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	2	1	21,639,000	10,771,600	49.78	-
5.01. 03.2. 01.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat daerah	3	1	79,594,160	37,901,350	47.62	47.62
5.01. 03.2. 01.0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	LaporanP erangkat daerah	3	3	11,740,100	940,100	8.01	8.01
5.01. 03.2. 01.0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	1	61,644,400	52,453,550	85.09	85.09
<b>5.01. 03.2. 02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksa Kordinasi Sinkronisasi Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400,843,350</b>	<b>140,184,290</b>	<b>34.97</b>	<b>34.97</b>
5.01. 03.2. 02.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	0	81,864,050	42,159,460	51.50	51.50
5.01. 03.2. 02.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	8	65,931,950	25,915,600	39.31	39.31

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01. 03.2. 02.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	3	28,410,000	-	-	-
5.01. 03.2. 02.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	1	42,014,500	9,858,200	23.46	23.46
5.01. 03.2. 02.0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Dokumen	2	1	49,649,600	14,072,900	28.34	28.34
5.01. 03.2. 02.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	2	3	56,653,950	23,748,720	41.92	41.92
5.01. 03.2. 02.0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	2	2	28,410,000	4,459,850	15.70	15.70
5.01. 03.2. 02.0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	1	47,909,300	19,969,560	41.68	41.68
<b>5.01. 03.2. 03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>394,799,175</b>	<b>113,243,263</b>	<b>28.68</b>	<b>28.68</b>
5.01. 03.2. 03.0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Dokumen	2	1	72,183,700	16,883,096	23.39	23.39
5.01. 03.2. 03.0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	SKPD	3	3	24,775,100	3,774,750	15.24	15.24
5.01. 03.2. 03.0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	SKPD	3	3	16,075,851	2,196,000	13.66	13.66
5.01. 03.2. 03.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	1	75,000,000	23,881,530	31.84	31.84



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01. 03.2. 03.0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1	85,499,700	33,306,737	38.96	38.96
5.01. 03.2. 03.0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	SKPD	7	7	13,060,150	799,750	6.12	6.12
5.01. 03.2. 03.0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	SKPD	7	7	18,560,050	4,805,750	25.89	25.89
5.01. 03.2. 03.0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	0	89,644,624	27,595,650	30.78	30.78

Rata- rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Perencanaan adalah sebesar 40,22% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

## 2.36. Unsur Keuangan

### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Keuangan diampu oleh dua Perangkat Daerah, yaitu pada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Bapenda alokasi anggaran belanja sebesar Rp.12.020.806.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.165.727.040,00 atau 42,97%. Sedangkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah alokasi anggaran belanja sebesar Rp.181.929.822.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.73.533.097.292,00 atau 40,42 %. Adapun realisasi anggaran untuk Unsur penunjang keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.44 Realisasi Unsur Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
	<b>KEUANGAN</b>					<b>181.929.822.000</b>	<b>73.533.097.292</b>	<b>40,42</b>	<b>46,01</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal BPKAD Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>57</b>	<b>7.097.163.990</b>	<b>4.181.078.945</b>	<b>58,91</b>	<b>60,20</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>dokum en</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>85.638.650</b>	<b>37.616.886</b>	<b>43,93</b>	<b>45,99</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	1	1	35.192.700	29.054.886	82,56	85,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokume n	1	0	3.092.300	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokume n	1	0	2.995.200	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokume n	1	1	4.704.800	4.704.800	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokume n	1	0	4.891.200	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokume n	1	0	21.855.600	1.698.350	7,77	10,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokume n	1	0	12.906.850	2.158.850	16,73	20,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dokum en</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4.891.744.860</b>	<b>2.819.960.274</b>	<b>57,65</b>	<b>60,24</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30	15	4.817.113.000	2.764.365.284	57,39	60,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengkajian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokume n	1	0	16.781.500	5.500.000	32,77	35,00

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	56.402.360	50.094.990	88,82	90,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	0	1.448.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6.290.000</b>	<b>3.234.000</b>	<b>51,41</b>	<b>79,49</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	0	1.290.000	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	5.000.000	3.234.000	64,68	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>202.094.466</b>	<b>187.439.741</b>	<b>92,75</b>	<b>95,63</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	39	30	24.000.000	22.200.000	92,50	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	6	4	35.286.000	26.001.694	73,69	75,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4	4	142.808.466	139.238.047	97,50	100,00
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>471.812.386</b>	<b>311.086.134</b>	<b>65,93</b>	<b>66,23</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	12.864.500	11.589.640	90,09	92,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	17	138.262.656	92.202.678	66,69	70,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	44.816.457	39.715.800	88,62	90,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	5	112.451.773	52.586.300	46,76	50,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	paket	5	0	4.329.000	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	80	70	155.801.000	114.991.716	73,81	76,00

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	0	3.287.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>185.664.165</b>	<b>171.180.849</b>	<b>92,20</b>	<b>96,72</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1	48.501.483	39.976.650	82,42	85,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	104	104	137.162.682	131.204.199	95,66	98,77
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>laporan</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>710.625.150</b>	<b>253.312.973</b>	<b>35,65</b>	<b>47,87</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	50	0	1.890.000	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	220.572.150	100.879.865	45,74	48,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	488.163.000	152.433.108	31,23	48,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>543.294.313</b>	<b>397.248.088</b>	<b>73,12</b>	<b>78,97</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	0	44.110.500	11.025.538	25,00	30,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	7	146.766.000	71.979.000	49,04	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9	4	115.140.000	77.505.000	67,31	70,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	237.277.813	236.738.550	99,77	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan tersusun</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>173.998.185.200</b>	<b>69.065.831.782</b>	<b>39,69</b>	<b>40,74</b>
<b>9</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Ketepatan Laporan Keuangan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penatausahaan sesuai Standart Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>977.396.000</b>	<b>180.768.949</b>	<b>18,49</b>	<b>23,75</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen	2	0	18.450.000	0	0	0

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen	1	1	15.800.900	550.000	3,48	5,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	38	0	61.875.000	1.800.000	2,91	5,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifi	dokumen	38	0	56.375.000	8.800.000	15,61	18,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen	38	38	7.012.500	6.453.000	92,02	93,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diver	dokumen	38	0	10.500.000	2.475.000	23,57	25,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	1	80.528.000	12.126.800	15,06	16,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	0	74.630.500	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	1	0	268.908.500	24.053.916	8,95	10,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dokumen	1	0	352.525.600	124.510.233	35,32	48,00
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	38	0	30.790.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Perbendaharaan Daerah yang terkoordinasi dan terkelola</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>29</b>	<b>698.581.100</b>	<b>215.608.922</b>	<b>30,86</b>	<b>38,57</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	1	1	227.369.600	91.763.007	40,36	48,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	1	1	63.185.000	35.824.000	56,70	58,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	1	1	29.676.900	12.557.800	42,32	48,00



No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	dokumen	1	0	17.328.000	8.029.432	46,34	48,00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	1	0	0	0	0	0
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	38	9	361.021.600	67.434.683	18,68	28,00
11	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana</b>	%	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>624.820.000</b>	<b>319.361.861</b>	<b>51,11</b>	<b>54,08</b>
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	3	0	37.282.000	0	0	0
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan	39	28	152.875.900	108.299.550	70,84	72,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	1	372.815.100	172.444.439	46,25	50,00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	2	1	37.452.000	22.140.372	59,12	65,00
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	orang	38	25	24.395.000	16.477.500	67,54	70,00

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota							
12	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kewenangan</b>	%	100	39	171.697.388.100	68.350.092.050	39,81	42,50
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	1	1	150.614.946.500	68.200.092.050	45,28	46,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	1	0	7.500.000.000	150.000.000	2,00	5,00
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	laporan	1	0	13.582.441.600	0	0	0
13	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	dokum en	1	0	0	0	0	0
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokume n	1	0	0	0	0	0
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	38	0	0	0	0	0
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi</b>	%	100	33	834.472.810	286.186.565	34,30	37,08
14	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan</b>	dokum en	11	7	834.472.810	286.186.565	34,30	37,08
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokume n	2	1	28.500.000	11.220.000	39,37	40,00
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokume n	2	0	1.375.000	0	0	0
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokume n	2	0	32.058.400	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	1	0	61.755.000	0	0	0
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan	30	0	29.686.900	3.422.250	11,53	12,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan	60	0	202.481.550	16.323.835	8,06	10,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	2	0	64.059.200	11.953.817	18,66	20,00

No.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	1	0	43.417.650	4.964.850	11,44	12,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	38	0	240.092.600	122.510.533	51,03	52,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	laporan	2	2	124.046.510	115.791.280	93,35	95,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	38	0	7.000.000	0	0	0
	<b>TOTAL</b>					<b>181.929.822.000</b>	<b>73.533.097.292</b>	<b>40,42</b>	<b>46,01</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Unsur Penunjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar 42,61 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

**Tabel 2.45 Realisasi Unsur Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN</b>					<b>12,020,806,000</b>	<b>5,165,727,040</b>	<b>42.97</b>	45.39
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>90</b>		<b>8,221,643,797</b>	<b>4,477,172,866</b>	<b>54.46</b>	<b>54.79</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	2		78,274,000	28,290,500	36.14	36.14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	1	1	67,804,000	24,725,500	36.47	36.47
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1		1,750,000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1		1,750,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	1,575,000	1,575,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1		1,575,000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	1		1,830,000	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	13	6	1,990,000	<b>1,990,000</b>	100.00	100.00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>4</b>		<b>5,043,104,066</b>	<b>2,860,336,567</b>	<b>56.72</b>	<b>56.83</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	33	33	4,814,939,266	2,730,185,407	56.70	56.70
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	6	131,260,800	59,815,000	45.57	50.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	94,804,000	70,336,160	74.19	74.19
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	12	6	2,100,000	-	-	-
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Dok</b>	<b>1</b>		<b>1,425,993</b>	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	1		1,425,993	-	-	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>3</b>		<b>126,950,000</b>	<b>59,846,441</b>	<b>47.14</b>	<b>47.14</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	34	34	20,700,000	<b>20,700,000</b>	100.00	100.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	1	56,250,000	<b>4,337,200</b>	7.71	7.71
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndanga	orang	5	5	50,000,000	<b>34,809,241</b>	69.62	69.62
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan</b>	<b>paket</b>	<b>5</b>		<b>587,622,354</b>	<b>206,957,547</b>	<b>35.22</b>	<b>38.86</b>

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	9,556,567	9,552,150	99.95	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	2	142,235,192	48,199,791	33.89	33.89
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	4	155,519,759	42,512,879	27.34	27.34
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	1	76,910,836	40,996,006	53.30	53.30
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	24	6	203,400,000	87,064,221	42.80	42.80
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>5</b>		<b>1,554,844,904</b>	<b>1,053,110,190</b>	<b>67.73</b>	<b>67.73</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	7	6	978,864,096	895,100,000	91.44	91.44
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	53	51	182,476,013	113,585,190	62.25	62.25
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	50	8	197,899,772	44,425,000	22.45	22.45
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1		195,605,023	-		
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Lap</b>	<b>3</b>		<b>598,778,440</b>	<b>225,401,189</b>	<b>37.64</b>	<b>37.64</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	6	1,050,000	75,000	7.14	7.14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	6	326,274,840	111,019,247	34.03	34.03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	6	271,453,600	114,306,942	42.11	42.11
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>		<b>230,644,040</b>	<b>43,230,432</b>	<b>18.74</b>	<b>18.74</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	31,846,000	8,040,532	25.25	25.25



No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24	6	97,373,000	16,635,900	17.08	17.08
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	80	21	67,325,040	18,554,000	27.56	27.56
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		34,100,000	-	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>3.5</b>		<b>3,799,162,203</b>	<b>688,554,174</b>	<b>18.12</b>	<b>25.04</b>
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>3.5</b>		<b>3,799,162,203</b>	<b>688,554,174</b>	<b>18.12</b>	<b>25.04</b>
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	1	11,860,000	-	-	-
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	6	3	434,577,500	58,503,174	13.46	13.46
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	6	3	49,995,000	10,879,000	21.76	21.76
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	50	26	359,079,217	178,932,000	49.83	54.81
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan	11	11	311,527,200	52,510,300	16.86	16.86
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	2	1	590,657,000	58,043,800	9.83	51.31
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	okyek pajak	1600		84,440,000	7,036,000	8.33	8.33
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	124000	110000	645,546,005	90,220,000	13.98	13.98
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	11	11	12,998,544	-	-	-
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	6	3	157,500,000	19,958,000	12.67	12.67
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	8200	1487	632,289,540	134,104,900	21.21	21.21
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	105	32	261,516,197	31,021,900	11.86	11.86
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen	12	6	155,139,000	42,420,100	27.34	27.34

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	12	6	23,940,000	-	-	-
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	laporan	2	1	68,097,000	4,925,000	7.23	7.23
	<b>TOTAL</b>					<b>12,020,806,000</b>	<b>5,165,727,040</b>	<b>42.97</b>	45.39

Rata- rata capaian kinerja program pada Unsur Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar 0 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.37. Unsur Kepegawaian

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Kepegawaian diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.7.536.393.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.363.454.132,00 atau 44,66 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 47,21%. Adapun realisasi anggaran pada unsur penunjang Kepegawaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.46 Realisasi Unsur Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	%	100	52.38	5,192,330,270	2,646,949,619	50.98	56.91
1:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	52.38	99,631,650.00	47,161,260.00	47.34	71.05
1:01:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	3	93,773,600.00	45,321,410.00	48.33	53.08
1:01:02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1:01:03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
1:01:04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	980,000.00	980,000.00	100.00	100.00
1:01:06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	980,000.00	0.00	0.00	0.00
1:01:06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	7	1,498,050.00	859,850.00	57.40	60.07
1:02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</b>	%	100	55.09	3,919,699,923.00	2,197,586,304.00	55.74	69.47
1:02:01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	29	3,858,064,123.00	2,150,471,044.00	55.74	60.25
1:02:02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	285	3,112,600.00	2,000,000.00	64.25	68.08
1:02:03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	57,848,200.00	45,115,260.00	77.99	80.09
1:02:04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	1	675,000.00	0.00	0.00	0.00
1:03	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</b>	%	100	51.39	124,576,000.00	56,926,736.00	45.70	49.48

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1:03:01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	64	31	44,800,000.00	17,400,000.00	38.84	45.00
1:03:02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	6	79,776,000.00	39,526,736.00	49.55	53.96
<b>1:04</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>86.25</b>	<b>276,011,490.00</b>	<b>140,461,392.00</b>	<b>50.89</b>	<b>58.52</b>
1:04:01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	3	8,083,500.00	4,072,000.00	50.37	54.08
1:04:02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	47	47	61,251,470.00	61,247,876.00	99.99	100.00
1:04:03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	30,630,620.00	0.00	0.00	0.00
1:04:04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	3	25,117,190.00	6,852,200.00	27.28	30.05
1:04:05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	Orang/Kali	19	15	150,928,710.00	68,289,316.00	45.25	49.95
<b>1:05</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>220,202,652.00</b>	<b>100,213,000.00</b>	<b>45.51</b>	<b>59.08</b>
1:05:01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang disediakan	Jenis	1	0	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1:05:02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	3	177,702,652.00	100,213,000.00	56.39	59.08
<b>1:06</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>46.15</b>	<b>322,620,457.00</b>	<b>157,885,051.00</b>	<b>48.94</b>	<b>53.53</b>
1:06:01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	0	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
1:06:02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6	108,197,107.00	58,787,229.00	54.33	57.97
1:06:03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	213,023,350.00	99,097,822.00	46.52	49.08

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1:07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan/Rehabilitasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100	52.63	229,588,098.00	104,600,927.00	45.56	46.09
1:07:01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	6	52,525,000.00	18,342,027.00	34.92	39.65
1:07:02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	4	3	43,113,648.00	11,015,000.00	25.55	38.75
1:07:03	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/ direhabilitasi	Jenis	1	1	133,949,450.00	75,243,900.00	56.17	59.88
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	%	80	21.01	2,344,063,130.00	558,619,462.00	23.83	40.73
2:01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	85	6.21	787,011,580.00	50,158,488.00	6.37	29.52
2:01:01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	132,688,000.00	18,729,988.00	14.12	17.96
2:01:02	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	1	15,370,000.00	5,850,200.00	38.06	41.96
2:01:03	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	31,983,800.00	8,221,100.00	25.70	29.09
2:01:04	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lemba ga	1	0	537,689,130.00	0.00	0.00	0.00
2:01:05	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2	1	69,280,650.00	17,357,200.00	25.05	29.08
2:02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	%	85	27	702,037,600.00	198,847,497.00	28.32	38.07
2:02:01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4	1	629,831,000.00	167,428,067.00	26.58	30.09
2:02:02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	580	285	72,206,600.00	31,419,430.00	43.51	46.05



KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
2:03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN</b>	%	85	58.09	635,378,600.00	203,706,000.00	32.06	39.40
2:03:01	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	2	1	50,075,000.00	6,325,000.00	12.63	16.08
2:03:02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	57	50	528,659,650.00	157,522,000.00	29.80	30.05
2:03:03	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	7	7	56,643,950.00	39,859,000.00	70.37	72.08
2:04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN</b>	%	85	55.09	219,635,350.00	105,907,477.00	48.22	55.92
2:04:01	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	50	39	37,499,450.00	5,427,900.00	14.47	20.45
2:04:02	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	12	9	158,495,700.00	80,724,997.00	50.93	53.08
2:04:03	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	10	12	19,979,150.00	17,710,580.00	88.65	91.09
2:04:04	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	5	2	3,661,050.00	2,044,000.00	55.83	59.06
<b>TOTAL</b>						<b>7.536.393.400</b>	<b>3.363.454.132.</b>	<b>44,6</b>	<b>47.21</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Kepegawaian adalah sebesar 39,32% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.38. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Pendidikan dan Pelatihan diampu oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.2.086.127.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.452.663.646,00 atau 21,7%, sedangkan realisasi fisik sebesar 29,13%. Adapun realisasi anggaran pada unsur Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.47 Realisasi Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU DPA-SKPD (Rp)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp.	(%)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase aparatur yang lulus diklat</b>	%	78	19	2,086,127,600.00	452,663,646	21.70	29.13
3:01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Persentase ASN yang lulus Diklat dengan kategori baik</b>	%	80	8	149,074,600.00	14,045,000.00	9.42	14.65
3:01:01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	60	5	149,074,600.00	14,045,000.00	9.42	14.65
3:02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase ASN yang lulus Diklat dengan kategori baik</b>	%	80	21	1,937,053,000.00	438,618,646.00	22.64	28.95
3:02:01	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	50	0	38,863,000.00	0.00	0.00	0.00
3:02:02	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	2	1	1,898,190,000.00	438,618,646.00	23.11	28.95
<b>TOTAL</b>						<b>2,086,127,600</b>	<b>452,663,646</b>	<b>21.70</b>	<b>29.13</b>

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar 24,36 % atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

### 2.39. Unsur Penelitian dan Pengembangan

#### Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penelitian dan Pengembangan diampu oleh BADAN dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.8.254.904.450,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.148.286.628,00 atau 26.02%. Adapun realisasi anggaran pada unsur Penelitian dan Pengembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.48 Realisasi Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023  
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.0 2	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	7	0	8,254,904,450	2,148,286,628	26.02	
5.05.0 2.2.01. 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	2	0	991,269,250	366,922,643	37.02	37.02
5.05.0 2.2.01. 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	0	700,000,000	138,648,990	19.81	19.81
5.05.0 2.2.01. 12	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	0	200,000,000	198,569,343	99.28	99.28
5.05.0 2.2.01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	0	91,269,250	29,704,310	32.55	32.55
5.05.0 2.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2,710,000,000</b>	477,140,116	17.61	17.61
5.05.0 2.2.02. 01	Penelitian dan Pengembangan bidang Aspek - aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	0	500,000,000	98,867,256	19.77	19.77
5.05.0 2.2.02. 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	3	0	1,210,000,000	180,143,965	14.89	14.89
5.05.0 2.2.02. 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	0	500,000,000	98,898,225	19.78	19.78
5.05.0 2.2.02. 07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	500,000,000	99,230,670	19.85	19.85
5.05.0 2.2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000,000</b>	1,072,599,060	25.54	25.54
5.05.0 2.2.03. 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	0	300,000,000	59,210,397	19.74	19.74
5.05.0 2.2.03. 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	3	0	1,700,000,000	737,231,530	43.37	43.37
5.05.0 2.2.03. 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	0	500,000,000	99,236,120	19.85	19.85

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.0 2.2.03. 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	0	500,000,000	97,584,318	19.52	19.52
5.05.0 2.2.03. 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	0	400,000,000	79,336,695	19.83	19.83
5.05.0 2.2.03. 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	Dokumen	2	0	800,000,000	0	0	0
<b>5.05.0 2.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>353,635,200</b>	<b>231,624,809</b>	<b>65.50</b>	<b>65.50</b>
5.05.0 2.2.04. 01	Penelitian, pengemb. Dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	0	353,635,200	231,624,809	65.50	65.50
	<b>TOTAL</b>					<b>8.254.904.450</b>	<b>2.148.286.628</b>	<b>26.02</b>	

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 0% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

#### 2.40. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum diampu oleh Badan KESBANGPOL dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 8.975.749.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.616.437.263,00 atau 51.43%. Adapun realisasi anggaran pada Unsur Pemerintahan Umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49 Realisasi Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2023 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	%	100	50	4.037.096.134	2.220.967.613	55,01	54,92
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	14	25	82.396.400	30.906.305	37,51	37,55
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	dokumen	14	5	49.049.200	15.453.155	31,51	31,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	laporan	39	20	33.347.200	15.453.150	46,34	46,39

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	100	50	3.573.784.466	1.961.676.478	54,89	54,76
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	14	7				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	510	546	37.462.850	18.133.150	48,40	48,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	31.873.000	29.303.132	91,94	91,94
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>	%	100	50	86.201.402	73.699.341	85,50	85,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	2.993.094	2.993.094	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	36	36	15.896.270	15.896.270	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	0	1.000.000	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	paket	8	4	15.527.038	7.609.040	49,01	49,01
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	8	50.785.000	47.200.937	92,94	92,94
	<b>Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	100	50	61.799.832	61.672.821	99,79	99,86
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	4	4	22.681.801	22.555.200	99,44	99,62
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	5	39.118.031	39.117.621	100	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100	50	173.603.654	80.313.168	46,26	46,51
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	6	64.319.540	30.350.204	47,19	47,78
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6	109.284.114	49.962.964	45,72	45,76
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</b>	%	100	50	59.310.380	12.699.500	21,41	21,82



No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8	4	11.161.158	3.039.500	27,23	29,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	14	9.660.000	9.660.000	100,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	unit	2	2	38.489.222	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	<b>25</b>	<b>8,57</b>	<b>1.039.682.332</b>	<b>185.944.400</b>	<b>17,88</b>	<b>33,70</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	26	34,27	1.039.682.332	185.944.400	17,88	33,70
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	30	0	181.834.800	600.000	0,33	15,29
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	381	247	857.847.532	185.344.400	21,61	37,60
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Capaian Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat</b>	%	<b>100</b>	<b>24,83</b>	<b>2.307.982.746</b>	<b>2.051.540.250</b>	<b>88,89</b>	<b>88,76</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	24,83	2.307.982.746	2.051.540.250	88,89	88,76

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	320	200	294.898.246	73.955.250	25,08	24,91
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Stiuasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	15	15	1.953.945.000	1.953.945.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	6	2	59.139.500	23.640.000	39,97	35,83
4	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat</b>	%	100	9,63	90.346.475	-	-	-
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kab.Ktw.Barat</b>	%	100	9,63	90.346.475	-	-	-
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	45	40	57.581.475	-	-	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang endaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	50	0	21.745.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembayaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	4	0	11.020.000	-	-	-
5	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengembangan terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama</b>	%	100	3,73	206.469.813	1.650.000	0,80	0,80
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	%	100	3,73	206.469.813	1.650.000	0,80	0,80
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	60	0	126.525.063	-	-	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	70	17	76.544.750	1.650.000	2,16	2,16
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	2	2	3.400.000	-	-	-
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Soisial</b>	<b>Persentase partisipasi Instansi Vertikal (Tim keamanan Daerah) dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan konflik Sosial Budaya di Daerah</b>	%	100	50	1.294.171.500	156.335.000	12,08	15,44
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Prosentase Kerjasama dengan Aparat Keamanan (instansi vertikal) Dalam Rangka Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah</b>	%	100	50	1.294.171.500	156.335.000	12,08	15,44

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi TW II		REALISASI KEUANGAN		FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	dokumen	10	5	90.000.000	8.340.000	9,27	13,38
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pamantauan Oran Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	30	240	212.700.750	89.700.000	42,17	60,88
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	6	2	238.710.750	58.295.000	24,42	24,42
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	6	4	752.760.000	-	-	49,58
	<b>TOTAL</b>					<b>8.975.749.000</b>	<b>4.616.437.263</b>	<b>51,43</b>	<b>53,67</b>

Rata- rata capaian kinerja program pada unsur Pemerintahan Umum adalah sebesar 29,53% atau masuk kriteria **Sangat Rendah**.

# BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

### 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini karena perekonomian memiliki pengaruh besar terhadap taraf kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi suatu negara/wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Perwujudan kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, serta dengan menyelenggarakan tata kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di tingkat pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara akumulatif yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya sektor perekonomian dalam pembangunan, maka dibutuhkan perencanaan atau kerangka pembangunan ekonomi yang selaras dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam hal ini Rancangan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjadi bagian penting dalam menyusun RKPD, agar tercipta keselarasan antara kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan.

#### 3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

##### *Kinerja perekonomian Periode 2018-2022*

Kinerja perekonomian daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah yang ditinjau berdasarkan perkembangan capaian beberapa indikator makro ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir, beserta indikator terkalit terkait lainnya. Adapun indikator-indikator tersebut meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, dan Gini Rasio.

Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup stabil, meski masih perlu perbaikan dalam beberapa indikatornya. Hal ini digambarkan dari capaian beberapa indikator makro ekonomi yang memiliki trend perkembangan positif, yakni perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), indeks gini, laju inflasi, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut disajikan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat hingga 2022.



**Tabel 3. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,46	5,79	0,98	5,61	6,01
2.	TPT	%	2,88	2,58	4,76	4,70	4,51
3.	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,34		
4.	IPM	Indeks	72,46	72,85	72,87	73,07	73,41
5.	PDRB ADHB	Rp (Milyar)	17.827,43	19.334,40	20.523,76	23.708,75	26.265,06
6.	PDRB ADHK 2010	Rp (Milyar)	12.173,28	12.877,63	13.004,26	13.733,18	14.558,33
7.	Kemiskinan	%	4,27	4,11	3,59	3,95	3,93

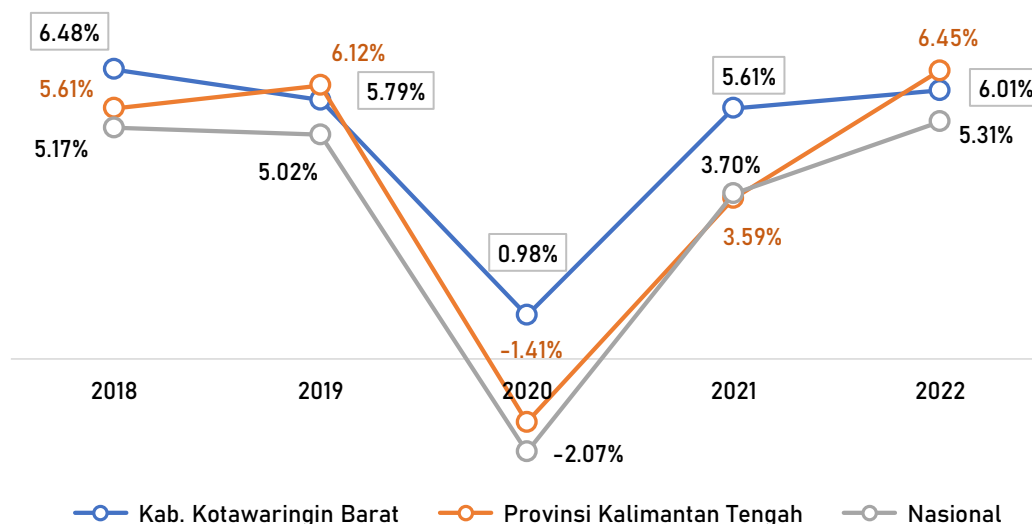
Sumber : BPS Kotawaringin Barat, 2023

### ***Pertumbuhan ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2021 hingga 2022 telah menunjukkan hasil yang semakin baik, dimana pada tahun 2020 seiring dengan adanya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan hingga pada posisi terendah sepanjang beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 memiliki nilai yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022). Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 6,48%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan secara bertahap, dimana pada tahun 2019 mencapai 5,79% dan pada tahun 2020 dengan adanya dampak Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan hingga mencapai 0,98%, dimana kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga turut mempengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat yang secara akumulasi mempengaruhi perlambatan ekonomi. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% dan kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,01%.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlihat bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali pada tahun 2019 dan 2022 dimana posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada kedua tahun tersebut masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sebagian besar Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2019 mencapai 6,12% atau terdapat selisih sebesar -0,33% dan pada tahun 2022 mencapai 6,45% dengan selisih sebesar -0,44%. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional maka pada tahun 2018 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kotawaringin Barat masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagian besar Kabupaten/ Kota di Indonesia. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

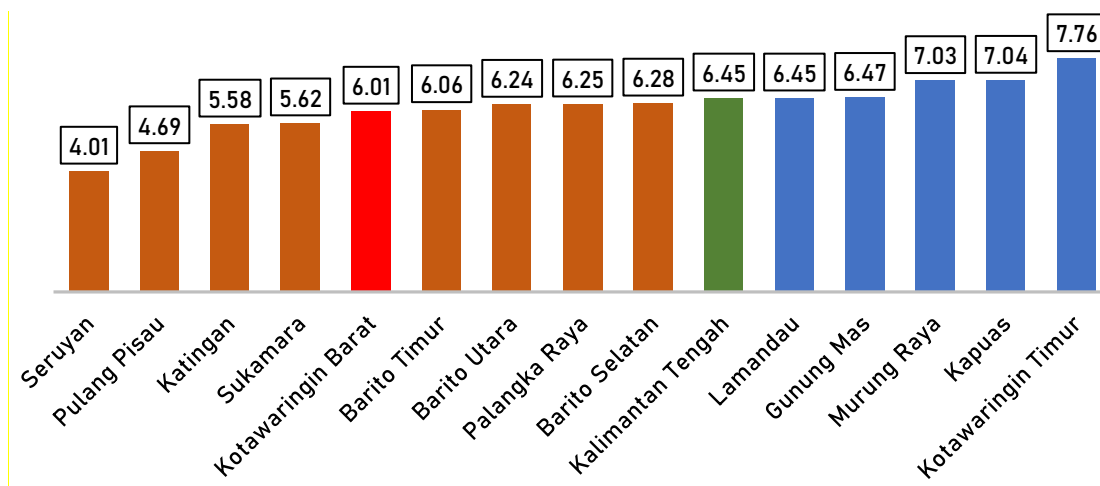


**Gambar 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat terlihat pada tahun 2022 posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada pada peringkat ke 10 dari 14 daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada peringkat ke 1 dari 14 daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya pada tahun 2022 banyak wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga menggeser posisi Kabupaten Kotawaringin Barat dari peringkat 1 menjadi 10. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus berusaha lebih maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya kembali berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan aktivitas produksi pada tahun yang akan datang. Bila melihat pada kondisi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 5 daerah (kabupaten/ kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga terdapat sebanyak 9 daerah (Kabupaten/ Kota) yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 6,45%. Untuk kondisi pertumbuhan ekonomi pada daerah disekitarnya seperti Kabupaten Lamandau pada tahun 2022 berada masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan posisinya berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu masing-masing sebesar 5,62% dan 4,01%. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022.



**Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih banyak disebabkan oleh kontribusi yang diberikan oleh peningkatan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha, dimana terdapat 9 sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, yaitu : Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Lapangan usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi pada tahun tersebut adalah Jasa lainnya yang mencapai 15,94%, sedangkan untuk 8 sektor lainnya pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan diatas 6,01%.

Melihat kondisi pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih ditunjang oleh adanya pertumbuhan pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 26,67%; Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan sebesar 9,81%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,93%; Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan sebesar 8,77%; Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 7,59%; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 7,58%. Pada tahun 2020 terdapat 7 sektor yang mengalami kontraksi dimana pertumbuhannya mengalami penurunan (minus) sebesar -32,36% untuk sektorJasa lainnya, Jasa Perusahaan sebesar -12,46%, dan Konstruksi sebesar -11,99%. Untuk keempat sektor lainnya mengalami penurunan pertumbuhan berada dibawah 9%. Terjadinya penurunan pertumbuhan PDRB hingga minus 32,36% disebabkan oleh adanya penurunan omzet penjualan usaha yang disebabkan oleh dampak Covid-19, sehingga dengan demikian turut mempengaruhi penurunan jumlah produk yang dihasilkan.

Untuk mengetahui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022**

No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	3,78	2,56	2,62	5,38
B	Pertambangan dan Penggalian	4,25	7,33	-0,05	-5,09	2,76
C	Industri Pengolahan	7,52	5,41	3,28	6,60	5,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	10,72	9,81	3,59	6,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,00	9,34	-3,35	9,05	1,73
F	Konstruksi	5,00	8,03	-11,99	12,05	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,44	6,40	2,65	5,71	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	8,22	7,05	-8,70	6,93	6,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	6,86	-6,47	2,41	4,31
J	Informasi dan Komunikasi	2,96	8,12	7,58	7,45	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	6,49	8,77	6,62	3,62
L	Real Estate	6,25	6,60	2,83	2,25	5,95
M,N	Jasa Perusahaan	4,98	6,73	-12,46	2,99	7,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,26	8,24	8,93	9,83	7,66
P	Jasa Pendidikan	6,97	8,22	7,59	2,05	2,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	7,68	26,67	14,39	7,23
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,80	7,34	-32,36	-2,90	15,94
	Produk Domestik Regional Bruto	6,48	5,79	0,98	5,61	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki struktur ekonomi dengan peran dari masing-masing sektor ekonomi yang beragam, dimana gambaran kondisi struktur ekonomi tersebut dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dalam setiap tahunnya. Secara kuantitatif, besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi bila dilihat dari kualitatifnya (persentase besarnya) peran yang diberikan masing-masing sektor terhadap perekonomian (PDRB ADHB) dari tahun ke tahun relatif tetap. Pada tabel 3.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa dari 17 sektor ekonomi/ lapangan usaha yang dijalankan di Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat 3 sektor yang secara konsisten dalam setiap tahunnya mempunyai andil/ kontribusi/ peran besar dalam pembentukan total PDRB/ perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat,

dimana total kontribusi yang diberikan rata-rata selama tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 64,77% atau telah melebihi 50% dari total nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun ketiga sektor/ lapangan usaha tersebut adalah :

1. Industri Pengolahan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25,91% dengan kontribusi yang cenderung semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 24,59% menjadi 27,01% pada tahun 2022;
2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 25,38% dengan kontribusi yang semakin meningkat dari tahun 2019 sebesar 23,88% menjadi 26,53% pada tahun 2022; dan
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 13,47%.

Selain ketiga sektor di atas di Kabupaten Kotawaringin Barat juga terdapat sektor yang memberikan kontribusi antara 7% hingga 8%, yaitu sektor Konstruksi dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 8,66% dan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 7,98%. Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang sangat kecil (berada dibawah 1%) dalam setiap tahunnya, yaitu : Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,05%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama sebesar 0,09%; Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan sebesar 0,90%; Jasa Perusahaan dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan sebesar 0,04%; serta sektor Jasa lainnya dengan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,79%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022**

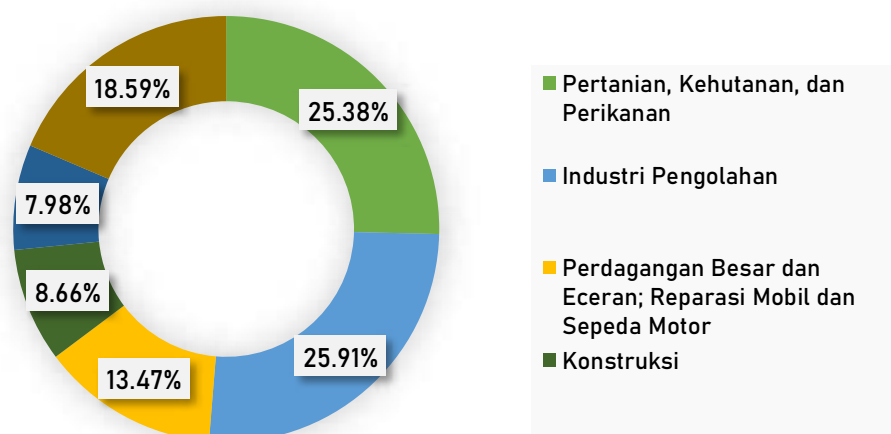
No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,87	23,88	25,32	26,29	26,53
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,33	1,26	1,12	1,07
C	Industri Pengolahan	25,54	24,59	25,39	27,04	27,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,11	9,58	8,05	8,22	8,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,26	13,78	14,04	13,12	13,17



No	Lapangan Usaha	Tahun/ Persen (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
H	Transportasi dan Pergudangan	8,59	8,97	7,80	7,26	7,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,38	1,27	1,14	1,11
J	Informasi dan Komunikasi	0,90	0,93	0,92	0,89	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	5,00	5,18	5,02	4,86
L	Real Estate	1,93	2,00	1,98	1,76	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,24	3,38	3,62	3,29	3,26
P	Jasa Pendidikan	2,65	2,76	2,84	2,59	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,20	1,47	1,51	1,51
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,00	1,03	0,67	0,59	0,64
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat selain didominasi oleh ketiga sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor Konstruksi dan Transportasi dan Pergudangan yang kelima sektor tersebut mewarnai 81,41% perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan keberadaan sektor lainnya (12 sektor) hanya memberikan kontribusi dengan persentase sebesar 15,59%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.3. Sektor Ekonomi yang Memberikan Kontribusi Terbesar dalam Struktur PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan pada data pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Sektor Prima merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah; Sektor Potensial merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah; Sektor Berkembang merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi; dan Sektor Terbelakang merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah. Untuk mengetahui hasil Klasifikasi sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Analisis Tipologi Klassen pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 3.4. Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan pada gambar yang telah disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat (Sektor Prima), yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Potensial) meliputi : sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Jasa Perusahaan; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Berkembang) adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) meliputi : sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Real Estate; sektor Jasa Pendidikan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; serta sektor Jasa lainnya.

Pengembangan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang memerlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis. Adapun sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui berdasarkan hasil Analisis Location Quotient (LQ), untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor i di kota atau kabupaten dan share output sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah daerah. Adapun hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Analisis LQ (Location Quotient) Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,303	1,265	1,261	1,222	1,246	Basis
2	Pertambangan & Penggalian	0,077	0,079	0,084	0,077	0,069	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,667	1,687	1,695	1,689	1,719	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,645	0,647	0,593	0,585	0,588	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,077	1,103	0,978	0,985	0,991	Non Basis
6	Konstruksi	1,018	1,020	0,972	0,990	1,018	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,037	1,035	1,050	1,071	1,073	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1,293	1,308	1,215	1,234	1,210	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,753	0,751	0,724	0,710	0,679	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,860	0,889	0,838	0,766	0,806	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,498	1,512	1,481	1,466	1,501	Basis

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					Keterangan
		2018	2019	2020	2021	2022	
12	Real Estate	0,892	0,914	0,920	0,905	0,930	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	1,168	1,170	1,159	1,150	1,124	Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,499	0,515	0,524	0,549	0,571	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,561	0,576	0,577	0,575	0,573	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,603	0,619	0,698	0,695	0,711	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,945	0,954	0,693	0,650	0,722	Non Basis

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan pada hasil perhitungan LQ sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 7 sektor di Kabupaten Kotawaringin Barat yang masuk menjadi sektor basis, dimana memiliki nilai LQ diatas 1. Adapun sektor-sektor tersebut meliputi : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Perusahaan. Dari 7 sektor tersebut sebanyak 6 sektor secara konsisten dalam setiap tahunnya menjadi sektor basis di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan 1 sektor lainnya yaitu sektor Konstruksi pada tahun 2020 dan 2021 tidak menjadi sektor basis karena terjadi penurunan nilai PDRB yang sangat signifikan pada tahun 2020, namun pada tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya kondisi pasca Pandemi Covid-19, maka keberadaan sektor tersebut kembali menjadi sektor basis. Sektor basis dengan nilai LQ diatas 1 ( $LQ > 1$ ) berarti bahwa sektor tersebut telah menjadi sebuah basis atau sumber pertumbuhan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil dari sektor tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayahnya sendiri dan surplusnya dapat dijual ke wilayah lain. Sedangkan 10 sektor lainnya yang termasuk sebagai sektor Non Basis ( $LQ < 1$ ) berarti bahwa sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri sehingga diperlukan pasokan dari wilayah luar.

Dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient), serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan pada besarnya peran/ kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 5 sektor ekonomi yang dapat menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/ penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor tersebut dapat berkolaborasi dan memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, bahkan dikombinasikan dengan bidang lainnya yang dapat menjadi stimulus berkembangnya sektor-sektor tersebut seperti pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang dapat mendukung Bergeraknya sektor perdagangan dan industri pengolahan melalui hilirisasi sehingga dapat dikembangkan agroindustri dan agrobisnis. Berkembangnya sektor Transportasi dan Pergudangan juga akan memicu perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun sektor Industri Pengolahan dan sebaliknya; berkembangnya sektor Konstruksi juga akan mendorong perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Industri Pengolahan maupun sektor Transportasi dan

Pergudangan dan sebaliknya melalui pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang lainnya.

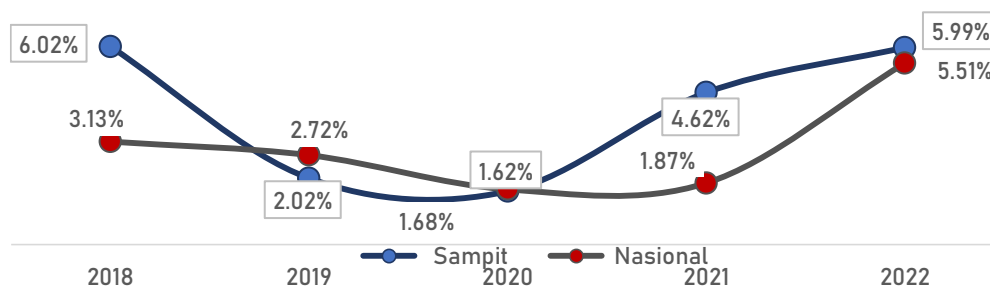
### ***Inflasi***

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya adalah Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), yaitu Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10% - 30% setahun; berat antara 30% - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), mengingat Kabupaten Kotawaringin bukan merupakan daerah sampel SBH (Survei Biaya Hidup), hanya terdapat 2 daerah yang terpilih sebagai sampel, yaitu Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Kota Palangka Raya. Besaran inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat diketahui berdasarkan pendekatan metode sister city terhadap inflasi di Sampit, mengingat Kabupaten Kotawaringin Barat secara geografis berdekatan dengan Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), selain itu beberapa fenomena di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kesamaan pola dengan Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur). Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya. Laju inflasi di Sampit pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2018 tercatat sebesar 6,02%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 2,02%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dengan laju inflasi selama tahun tersebut mencapai 1,62%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 laju inflasi di Sampit mengalami kenaikan menjadi 4,62% dan 5,99%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Sampit dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi masih berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Posisi inflasi yang terjadi di Sampit dalam setiap tahunnya berada diatas inflasi secara nasional, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 inflasi di Sampit tercatat sebesar 1,62% atau lebih rendah dari inflasi secara



nasional yang mencapai 1,68%. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya daya beli masyarakat pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Berikut disajikan data perkembangan inflasi Sampit dan nasional pada tahun 2018 hingga 2022.



**Gambar 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Sampit dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Meningkatnya inflasi Sampit pada tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,45%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,01%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,15%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,34%; kelompok kesehatan sebesar 2,08%; kelompok transportasi sebesar 14,89%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,17%; kelompok pendidikan sebesar 3,27%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 7,36%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,38%. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,63%. Berikut disajikan data inflasi Sampit menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2022.

**Tabel 3.5. Inflasi Sampit Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 - 2022**

No	Kelompok Pengeluaran Inflasi (2018=100)	2020	2021	2022
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,85	4,17	6,45
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,25	1,39	2,01
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,35	15,02	4,15
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,57	3,90	4,34
5	Kesehatan	0,43	23,43	2,08
6	Transportasi	1,20	-2,49	14,89
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,11	0,13	-0,63
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,33	1,85	0,17
9	Pendidikan	-1,56	4,35	3,27
10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0,84	2,29	7,36
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,01	2,32	6,38
	<b>UMUM</b>	<b>1,62</b>	<b>4,62</b>	<b>5,99</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa inflasi Sampit pada tahun 2020 sebagian besar merupakan andil yang diberikan oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar 8,01%. Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 tidak terlepas dari andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 23,43%, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi sebesar 15,02%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi pada tahun 2022, andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 14,89% dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran yang mengalami inflasi sebesar 7,36%. Pada kelompok Transportasi dari 4 subkelompok, 3 subkelompok mengalami inflasi, 1 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu: subkelompok pembelian kendaraan sebesar 0,05%, subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,38%, subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 8,94%. Sementara subkelompok yang tidak mengalami perubahan, yaitu subkelompok jasa pengiriman barang.

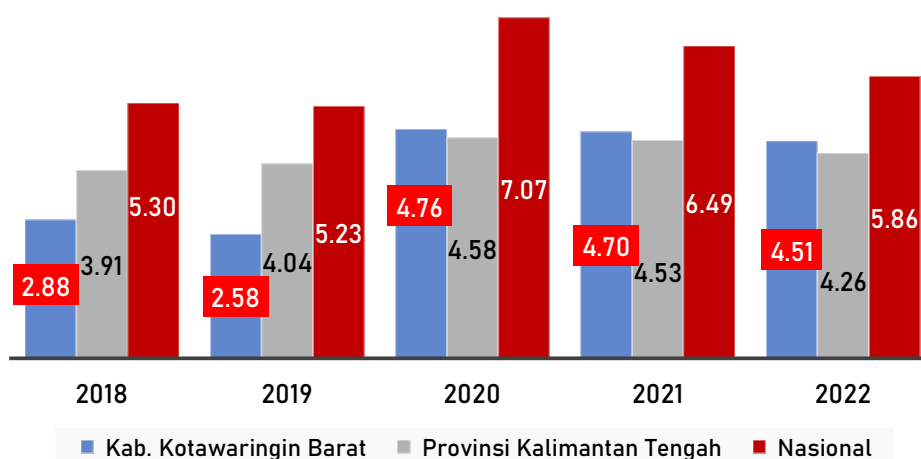
Bila melihat pada data-data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Sampit hingga tahun 2022 masih terkendali, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2022 namun masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholders terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang terlalu tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi/ usaha dalam pengambilan keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

### ***Pengangguran***

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) dibandingkan dengan jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan (angkatan kerja) di suatu wilayah. TPT merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pengangguran dalam suatu wilayah. Semakin tinggi TPT, maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Semakin tinggi pula tingkat pengangguran di wilayah tersebut. TPT menurut definisi dan rumus yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, besarnya TPT pada suatu wilayah dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 2,88 dan seiring dengan berkurangnya jumlah pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 menurun

menjadi 2,58. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan menjadi 4,76. Terjadinya peningkatan TPT pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,05% sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 seiring dengan kondisi yang masih dalam Pandemi Covid-19, maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tercatat cukup tinggi dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,06 sehingga menjadi 4,70. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar 0,19 sehingga menjadi 4,51. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat yang tercatat sebesar sebesar 4,51 memiliki arti bahwa pada setiap 100 penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja terdapat 5 penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang belum membaik di Kabupaten Kotawaringin Barat, di mana jumlah pengangguran yang masih tinggi tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Situasi tersebut juga mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah pencari kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah ketersediaan lapangan kerja. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023*

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2019 bila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun pada tahun 2020 sampai dengan 2022 posisinya berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah dan masih tetap berada dibawah Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/ kota di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, tren yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022 memang merupakan kondisi yang secara umum dialami oleh sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Indonesia, mengingat meningkatnya jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh sebagian besar daerah di Indonesia.

Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tepat dan strategis dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan keterampilan dan pelatihan kerja, memberikan insentif dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya, dan meningkatkan akses pasar dan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat terus menurun dan kondisi ketenagakerjaan menjadi semakin baik.

**Tabel 3.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

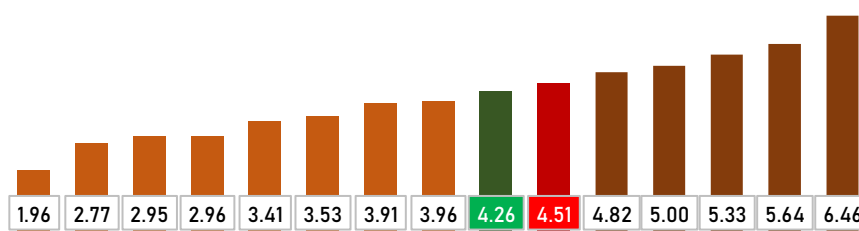
Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	224.960	232.387	234.325	238.641	243.576
Angkatan Kerja	162.602	170.652	171.085	167.070	167.162
Bekerja	157.700	166.183	162.949	159.220	159.627
Pengangguran	4.902	4.469	8.136	7.850	7.535
Bukan Angkatan Kerja	62.358	61.735	63.240	71.571	76.414

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan kerja dalam menentukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2018, pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 52,57%, sementara angkatan kerja hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,57%. Pada tahun 2019, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebabkan oleh penurunan jumlah pengangguran sebesar -8,83%, sedangkan angkatan kerja hanya mengalami pertumbuhan sebesar 4,95%. Begitu juga pada tahun 2021, di mana jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar -3,52% sementara angkatan kerja hanya turun sebesar -2,35%, sehingga penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi hanya sedikit. Pada tahun 2022 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat, maka jumlah pengangguran kembali mengalami penurunan sebesar -4,01%, sementara angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 0,06%, sehingga nilai TPT

pada tahun tersebut mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan di sektor ketenagakerjaan yang dapat membantu memperkuat perekonomian suatu wilayah walaupun dampak pandemi COVID-19 masih terasa pada sektor ketenagakerjaan dan perekonomian secara keseluruhan.

Bila dibandingkan dengan kondisi kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah lainnya, pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan pada peringkat ke-9 dari 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,51, Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,25. Terdapat 6 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Sukamara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kotawaringin Barat itu sendiri. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

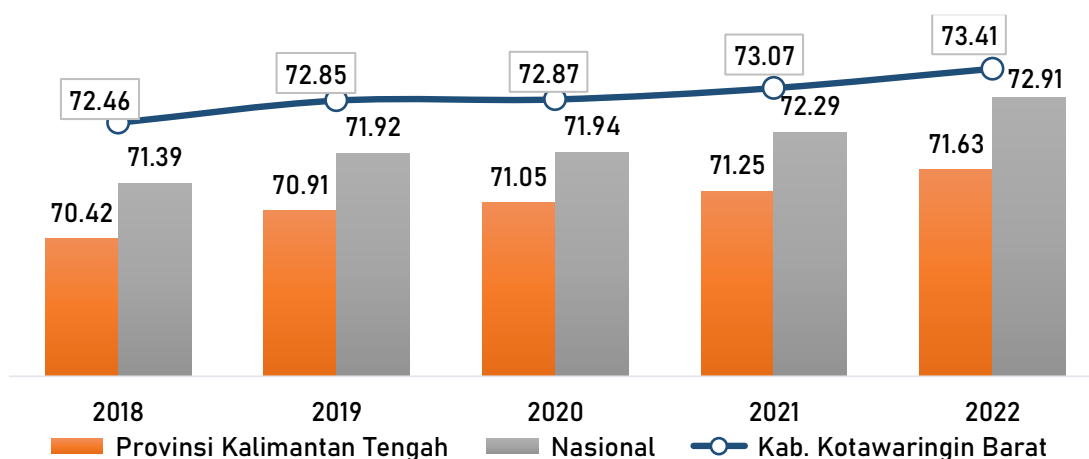
### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu wilayah dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM merupakan indikator yang lebih luas dan holistik dibandingkan dengan pengukuran ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IPM memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemajuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Dengan menggunakan IPM, suatu wilayah dapat melihat bagaimana kesejahteraan masyarakatnya berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dapat diambil keputusan strategis yang lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan di masa yang akan datang.

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai IPM nasional mencapai 71,39, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 70,42, dan IPM Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 72,46. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin



Barat meningkat menjadi 72,85, lalu kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 72,87. Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 73,01 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi mencapai 73,41. Sementara itu, dalam 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional juga mengalami peningkatan, dari 70,42 pada tahun 2018 menjadi 71,63 pada tahun 2022 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari 71,39 menjadi 72,91 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional. Untuk mengetahui perkembangan nilai IPM Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

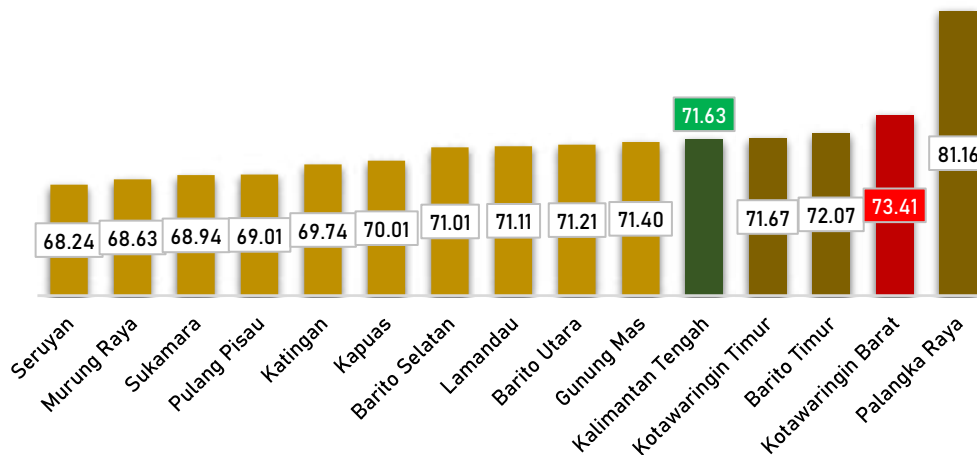


**Gambar 3.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023*

Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan variasi antar kabupaten/ kota. Kota Palangka Raya tercatat memiliki IPM tertinggi sebesar 81,16, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dengan IPM sebesar 73,41. Sedangkan Kabupaten Seruyan memiliki IPM terendah sebesar 68,24 dengan kategori sedang. Posisi IPM Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain (kabupaten/ kota) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 berada pada peringkat 2 dari seluruh/ sebanyak 14 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 71,63. Perbedaan IPM ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di masing-masing kabupaten/ kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten/ kota dengan IPM yang masih rendah, agar kesenjangan pembangunan antar daerah dapat diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Untuk mengetahui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

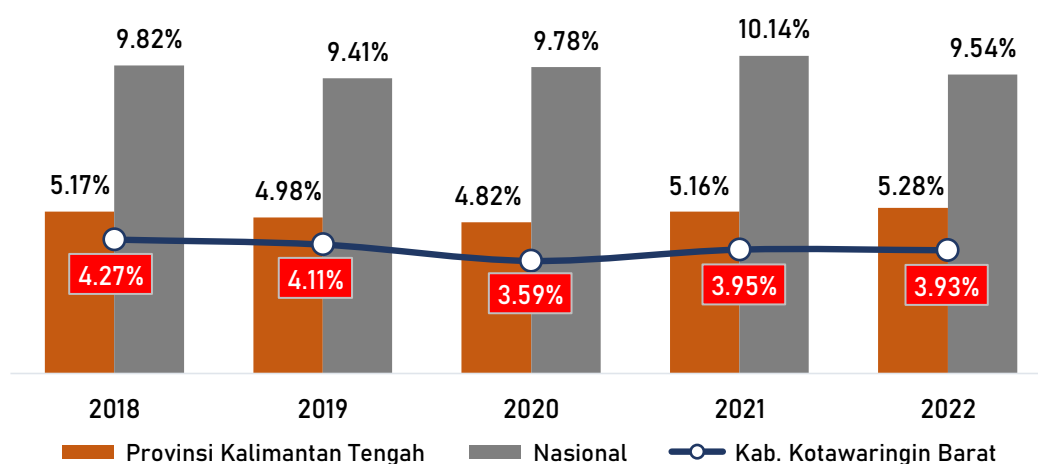
### ***Kemiskinan***

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat walaupun telah memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, tren persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan pola yang sama dengan jumlah penduduk miskin. Persentase kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun, mulai dari 4,27% pada tahun 2018 menjadi 3,93% pada tahun 2022, kecuali pada tahun 2021 dimana terjadi kenaikan persentase kemiskinan menjadi 3,95% karena dampak pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 menggambarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 3,95% dan 3,93% dari keseluruhan jumlah penduduk di daerah tersebut. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan dengan sebagian besar daerah di Indonesia menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah berkontribusi dalam menurunkan persentase kemiskinan di daerah tersebut.

Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun persentase tersebut masih lebih rendah daripada kondisi pada tahun 2018 dan 2019, serta juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat terbilang cukup berhasil. Selain itu, kenaikan persentase kemiskinan pada tahun 2021 juga terjadi pada sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional pada tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.10. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023

Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) digunakan dalam penghitungan kemiskinan makro di banyak negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menempatkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Dalam pengaplikasiannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut yang merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, dihitung dari pengeluaran rumah tangga per bulan yang dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Orang yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai orang miskin. Dalam penghitungannya, garis kemiskinan dihitung dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang disingkat sebagai GK.

Setiap tahun Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga yang mengakibatkan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non-makanan semakin meningkat. Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 344.337

per kapita per bulan. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 476.297 per kapita per bulan, atau mengalami kenaikan sebesar 38,32% atau sebesar Rp. 131.960 dari tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya Garis Kemiskinan, dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami tren yang cenderung menurun, yaitu dari 12,9 ribu jiwa menjadi 12,4 ribu jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,5 ribu jiwa atau 3,88%. Dalam lima tahun terakhir, penurunan jumlah penduduk miskin paling signifikan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 10,16%. Pada tahun sebelumnya (2018-2019), penurunan jumlah penduduk miskin hanya berada di bawah 1,0%. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 meningkat dari 11,5 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 12,3 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,69%. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 12,4 ribu jiwa dari 12,3 ribu jiwa pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 0,81%.

Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

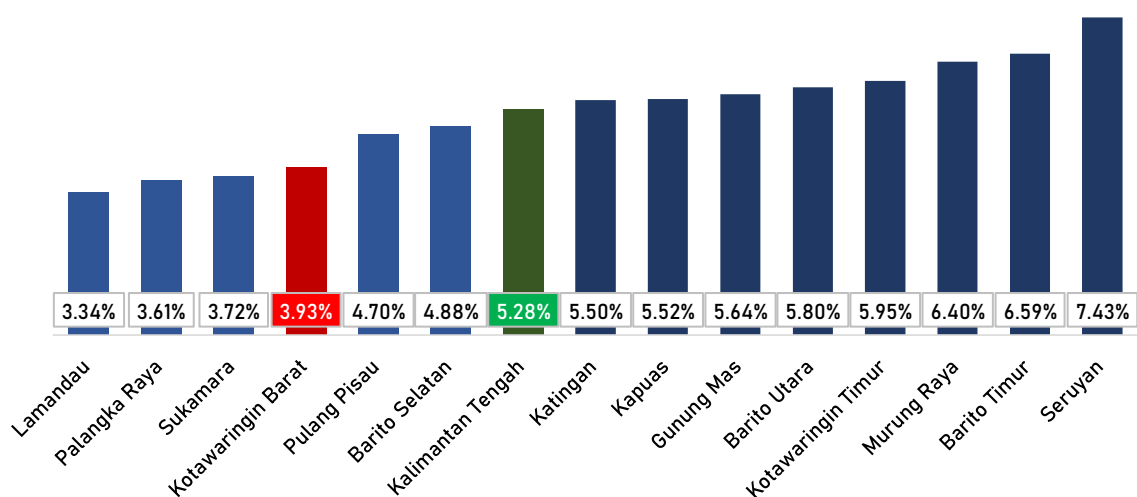
**Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	12,9	12,8	11,5	12,3	12,4
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	344.337	360.942	397.883	418.388	476.297

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Persentase kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 telah berada pada peringkat keempat dari 14 kabupaten/ kota. Sementara jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 5,28%, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 1,35%. Terdapat enam kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki persentase kemiskinan di bawah rata-rata provinsi, yaitu : Kabupaten Lamandau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mempertahankan dan lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan serta program-program yang dapat membantu menurunkan angka kemiskinan secara terintegrasi, sehingga persentase kemiskinan dapat semakin menurun. Untuk mengetahui Tingkat Kemiskinan berdasarkan

kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.11. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin, melainkan juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, selain mengurangi jumlah penduduk miskin, perlu juga dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan di antara penduduk miskin. Dua indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan memberikan gambaran tentang sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk mengetahui perkembangan hasil perhitungan dari kedua indeks tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

**Tabel 3.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,55	0,55	0,40	0,48	0,47
Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,12	0,13	0,08	0,09	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023



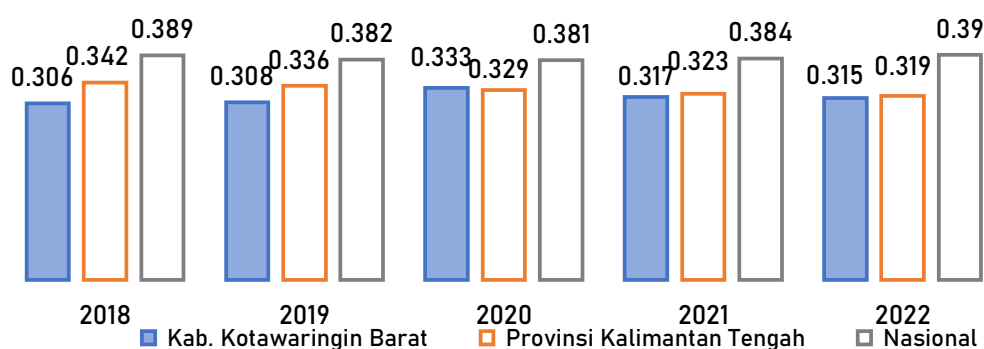
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami tren menurun, dimana pada tahun 2019 nilai indeks memiliki posisi stagnan pada angka 0,55. Pada tahun 2020 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sebesar 0,15 sehingga menjadi 0,40. Sedangkan pada tahun 2021 nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,48 atau meningkat sebesar 0,08, namun nilainya masih berada dibawah tahun 2019. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,01, menjadi 0,47. Terjadinya penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mendekati garis kemiskinan, dan sebaliknya apabila terjadi kenaikan dari nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Semakin kecilnya nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin baik, karena dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, berarti kondisi kesejahteraan penduduk tersebut semakin meningkat. Bila melihat nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tren yang hampir serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, namun pada tahun 2018 dan 2019 nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Dalam tahun 2022, nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap stabil pada angka 0,09, yang menunjukkan tidak adanya peningkatan atau penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan signifikan dalam nilai indeks tersebut, yang menurun dari 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,08 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang. Kenaikan nilai indeks pada tahun 2021 menjadi 0,09, meskipun masih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, menunjukkan bahwa ada peningkatan sedikit dalam kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin. Namun demikian, kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori baik/ rendah, karena nilai indeks masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa nilai indeks keparahan kemiskinan dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya. Penurunan nilai indeks ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sedang berjalan dengan baik. Namun, perlu terus dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kesenjangan tersebut dapat terus diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk wilayah dengan kemiskinan yang rendah, namun memiliki tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan rendah, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan lapangan kerja baru. Pengembangan sektor-sektor ekonomi ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan

memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan di pasar kerja. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap kesempatan kerja dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang sama terhadap peluang kerja dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja secara keseluruhan.

### ***Gini Rasio***

Untuk menilai tingkat sejahtera suatu daerah, dapat dilihat dari distribusi pendapatan yang merata atau tidak. Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan atau meratanya pendapatan pada suatu daerah adalah dengan menggunakan Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, yang dihitung dengan mengukur rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Dalam rangka mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk, Rasio Gini diupayakan mendekati 0. Untuk mengetahui gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun terakhir (2018 - 2022) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



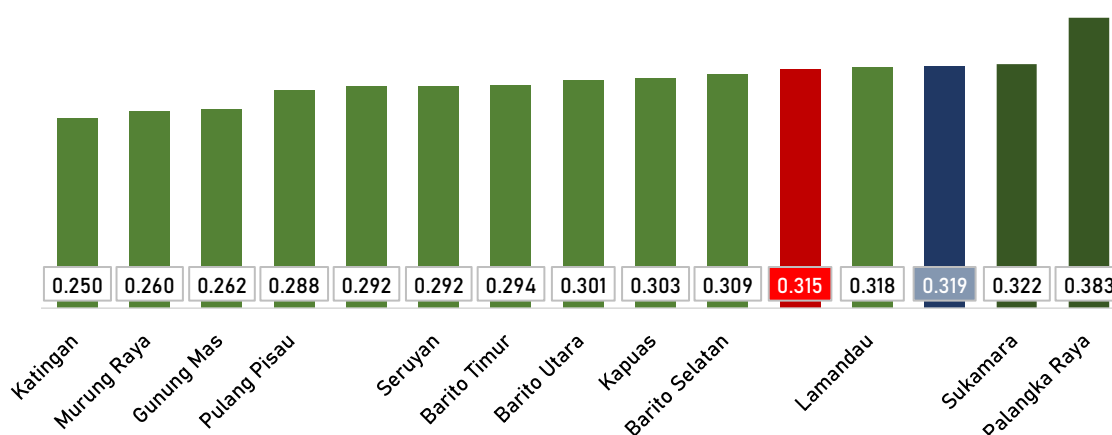
**Gambar 3.12. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pusat, 2023*

Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,306. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0,308 menjadi 0,333. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat distribusi penduduk masih merata. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai gini rasio Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,317 dan 0,315. Nilai rasio gini dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio

Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Kalimantan Tengah, seperti Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangka Raya yang memiliki nilai rasio gini di atas 0,315.

Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Kalimantan Tengah Gini Rasio Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 telah berada pada peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 0,319, maka posisi Kabupaten Kotawaringin Barat masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,004. Pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2 Kabupaten/ Kota yang memiliki Gini Rasio berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui Gini Rasio berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.13. Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Meskipun memiliki Gini Rasio rendah, Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki TPT yang tinggi, yang berarti masih banyak penduduk yang mencari pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya lapangan kerja, kurangnya keterampilan atau pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, atau tidak adanya kemampuan penduduk untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduknya, seperti memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendidikan penduduk, serta memberikan pelatihan dan dukungan bagi wirausaha lokal untuk mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja baru.

Upaya penurunan indeks gini di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan. Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut, seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, memperluas akses

terhadap sumber daya ekonomi, serta memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonominya.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dihadapkan dengan risiko ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika global, termasuk perang Rusia-Ukraina. Perang ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, karena Rusia dan Ukraina merupakan penghasil sejumlah komoditas utama di dunia. Rusia menjadi eksportir utama energi seperti BBM, batu bara, dan gas alam cair, sedangkan Ukraina menjadi eksportir utama seed oil, jagung, dan gandum. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga serta meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM, yang berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perekonomian Indonesia akan berbalik cerah pada tahun 2024 baik dari sisi global maupun dalam negeri, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai kisaran 5,3% hingga 5,7% secara tahunan. Untuk tahun 2023, diperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,7%, dengan tingkat inflasi yang diharapkan kembali menurun ke level 1,5% hingga 3,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah diprediksi akan terjaga stabil di kisaran Rp. 14.800 hingga Rp. 15.400, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5% hingga 7,4%. Meskipun terjadi tekanan global yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia, diprediksi bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi. Dampak tekanan global tersebut diperkirakan akan terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan. Namun, kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif kecil, sehingga dampak dari jalur perdagangan terhadap ekonomi Indonesia relatif terbatas. Di sisi lain, kenaikan harga batu bara akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina diharapkan dapat mengompensasi penurunan ekspor lainnya. Sementara itu, di jalur keuangan, diperkirakan terjadi tekanan terhadap kurs rupiah akibat menguatnya dolar AS seiring dengan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dibandingkan dengan kawasan Eropa, serta kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).

Dalam menghadapi tekanan global dan potensi resesi pada 2023, Indonesia menghadapi tekanan global dan potensi resesi yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan tidak akan masuk ke dalam jurang resesi. Dampak resesi global terhadap Indonesia terutama terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan, di mana ekspor mengalami perlambatan dan kurs rupiah terkena tekanan akibat penguatan dolar AS. Untuk menekan inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan kenaikan suku bunga acuan, namun hal ini berpotensi mempengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memberikan prioritas pada kebijakan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi dari resesi global. Selain itu, kolaborasi dan sinergi di antara stakeholder perlu diperkuat agar Indonesia dapat bangkit lebih kuat secara berkelanjutan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang diakibatkan tekanan ekonomi global, pemerintah Indonesia akan terus menggencarkan diversifikasi negara tujuan ekspor, seperti ke India dan kawasan Timur Tengah yang masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil.

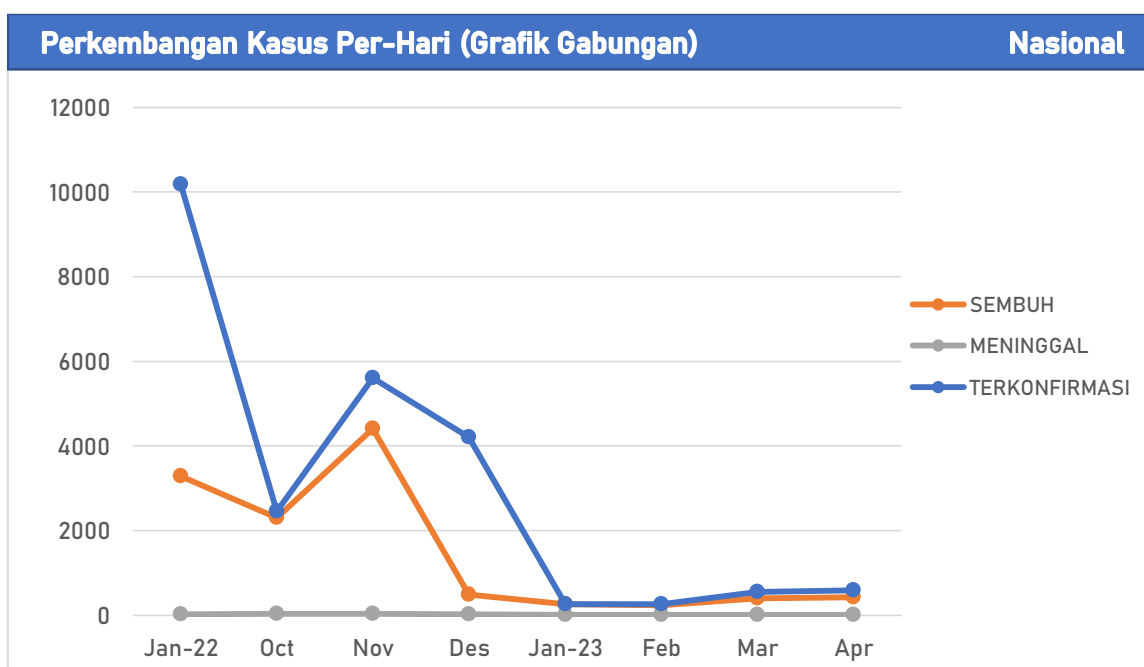


Selain dihadapkan dengan risiko ketidakpastian, tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomia adalah penerapan green economy dan blue economy. Green economy dan blue economy adalah dua konsep ekonomi yang muncul sebagai respons terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia. Green economy fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian organik. Sedangkan blue economy lebih berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekologi laut. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kedua konsep tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan beragam sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan komitmen dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah untuk memprioritaskan keberlanjutan dan lingkungan dalam pengembangan ekonomi. Tantangan dalam penerapan green economy dan blue economy di Indonesia masih cukup besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan, masih adanya praktik-praktik ekonomi yang merusak lingkungan, dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau dan sumber daya keuangan. Selain itu, sektor blue economy di Indonesia juga masih mengalami tantangan, seperti pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal, perburuan ikan yang berlebihan, dan perusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi yang besar untuk menghadapi tantangan green economy dan blue economy. Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal kekayaan hutan dan perkebunan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat adalah terkait dengan kegiatan illegal logging, pertambangan, dan perkebunan yang mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan industri kayu yang berkelanjutan, di mana kayu yang digunakan berasal dari hutan-hutan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis ekowisata, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain green economy, Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan blue economy, terutama dalam hal potensi perikanan dan kelautan. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki wilayah pesisir yang luas dengan kekayaan laut yang melimpah, seperti ikan, kepiting, udang, dan rumput laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, seperti dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam budidaya ikan dan produksi rumput laut. Dengan demikian, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menghadapi tantangan green economy dan blue economy dengan mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan.



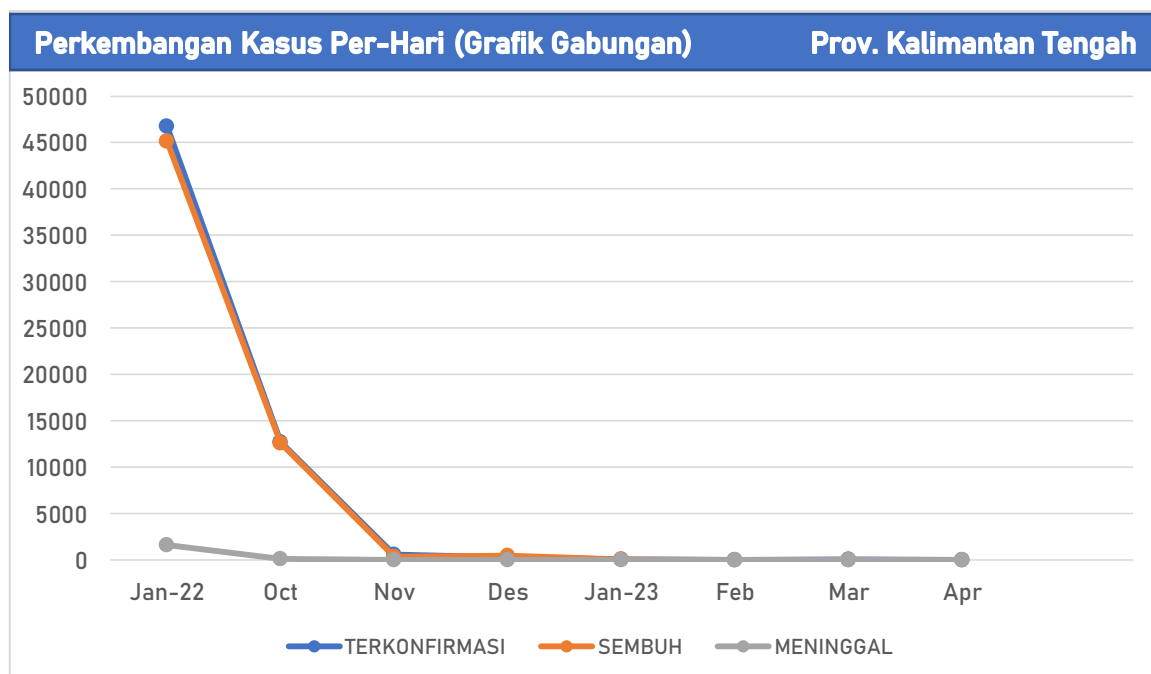
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengakibatkan dampak besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun, di tahun 2023, kondisi mulai membaik seiring dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan penurunan angka kasus positif Covid-19. Dengan adanya kondisi ini, pemerintah dapat melakukan pembukaan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, program stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dalam memulihkan kembali kondisi ekonomi. Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia, data yang dirilis menunjukkan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2022 hingga saat ini. Berdasarkan data terbaru hingga tanggal 06 April 2023, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 6.749.564 kasus dengan 161.044 kasus meninggal dunia. Meskipun demikian, terdapat kabar baik bahwa sebanyak 6.582.409 pasien Covid-19 di Indonesia berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Meski kasus aktif hingga saat ini masih sebanyak 6.111 kasus, pihak berwenang dan tenaga kesehatan terus berupaya untuk menangani situasi ini dengan berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih baik. Adapun data total kasus Covid-19 di Indonesia sampai tanggal 06 April 2023 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas terlihat tren penurunan kasus positif Covid-19 di Indonesia dari bulan Januari 2022 dengan jumlah 10.185 kasus menjadi 2.457 kasus pada bulan Oktober 2022. Namun, pada bulan November 2022, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 5.609 kasus, tetapi mengalami pengurangan yang cukup signifikan pada bulan Desember 2022 dengan jumlah 4.200 kasus dan bulan Januari 2023 mencapai 263 kasus. Meskipun pada bulan Februari hingga April 2023, perkembangan kasus terkonfirmasi mengalami kenaikan yang cukup stabil,

namun jumlahnya masih dalam batas kontrol dengan peningkatan kasus terkonfirmasi di bulan Februari sebesar 266 orang. Pada bulan Maret, kasus positif kembali meningkat menjadi 556 kasus, dan pada bulan April terkonfirmasi menjadi 591 kasus. Namun, meskipun terjadi fluktuasi kasus positif, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah kasus sembuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus meninggal. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia semakin berhasil dalam memberikan perawatan dan penanganan yang tepat.

Pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat sebanyak 60.502 kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga tanggal 08 April 2023. Dari jumlah tersebut, terdapat 58.710 kasus pasien yang telah sembuh dari virus tersebut. Namun, terdapat pula 1.743 kasus yang mengakibatkan meninggal dunia di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama. Perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah setiap harinya terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Pada bulan Oktober, tercatat 12.721 kasus terkonfirmasi, 12.588 kasus sembuh, dan 127 kasus meninggal. Angka kasus terus menurun hingga bulan Februari, dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 10 kasus, 24 kasus sembuh, dan 1 kasus meninggal. Pada bulan Maret, terdapat 37 kasus terkonfirmasi, 17 kasus sembuh, dan 3 kasus meninggal. Sedangkan pada bulan April, jumlah kasus terkonfirmasi menjadi 27 kasus, dengan 11 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. Adapun data total kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tanggal 08 April 2023 adalah sebagai berikut:



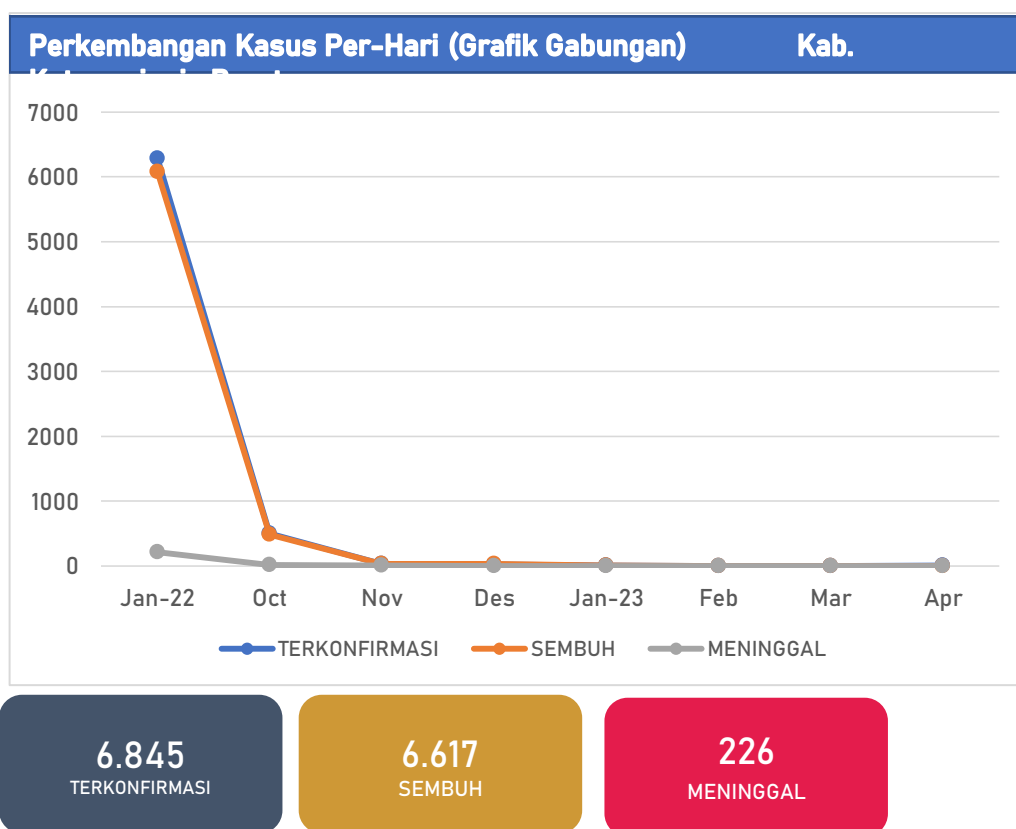
**60.502**  
TERKONFIRMASI

**58.710**  
SEMBUH

**1.743**  
MENINGGAL

Pada Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 hingga tanggal 08 April 2023 mencapai 6.845 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.617

pasien telah dinyatakan sembuh, sementara 227 kasus lainnya berakhir dengan kematian. Terdapat penurunan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat setiap harinya. Pada bulan Januari 2022, tercatat 6.282 kasus terkonfirmasi, dengan 6.074 kasus sembuh dan 207 kasus meninggal. Angka kasus terus menurun hingga bulan Oktober 2022 menjadi 500 kasus terkonfirmasi, 481 kasus sembuh, dan 17 kasus meninggal. Pada bulan November 2022 hingga Februari 2023, terjadi penurunan signifikan hingga tidak ada kasus terkonfirmasi, kasus sembuh, maupun kasus meninggal. Namun, pada bulan Maret 2023 terdapat 1 kasus terkonfirmasi, tanpa kasus sembuh dan meninggal. Pada bulan April 2023, tercatat 3 kasus terkonfirmasi, dengan 1 kasus sembuh dan 1 kasus meninggal. Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun telah terdapat pasien yang sembuh, namun jumlah kasus masih terus bertambah dan perlu adanya upaya pencegahan yang lebih maksimal. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Adapun data total kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tanggal 06 April 2023 adalah sebagai berikut:

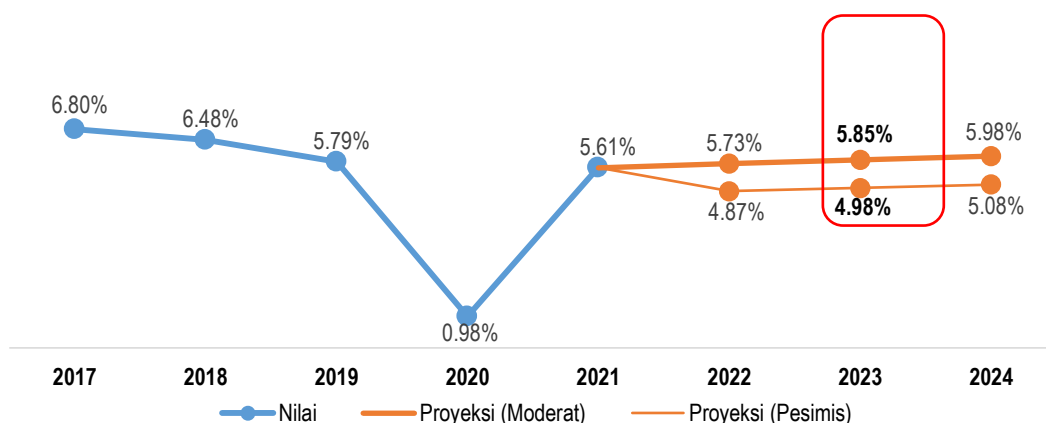


Meskipun pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada perekonomian nasional dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, namun upaya pemerintah dalam menstimulasi pemulihan ekonomi melalui program-program ekonomi yang lebih efektif dan efisien serta pemulihan investasi, turut mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 dan seterusnya, setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir, menurut proyeksi Bank Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang membaik, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, tetap perlu diingat bahwa perekonomian global dan Indonesia masih

menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemi Covid-19, perang dagang, dan ketidakstabilan politik di beberapa negara. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan ekonomi di beberapa sektor dan negara, namun belum dapat dipastikan apakah pemulihan ini akan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing guna menghadapi ketidakpastian yang masih ada.

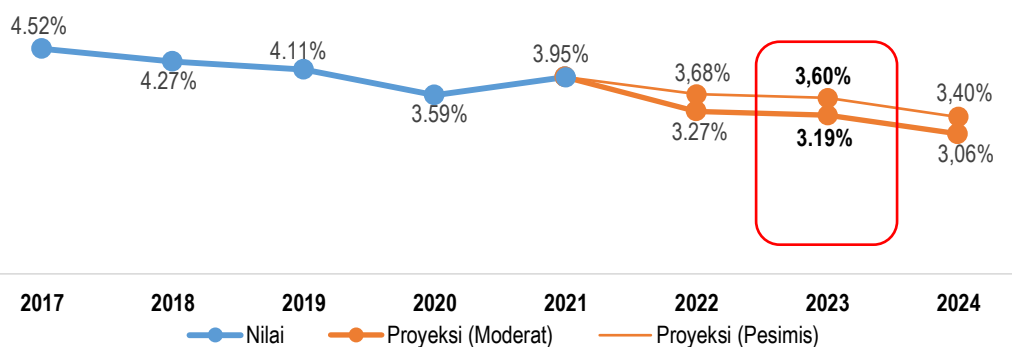
Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan menunjukkan kondisi yang kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19, baik secara nasional maupun di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang mampu tumbuh sebesar 6,01%, setelah sebelumnya pada tahun 2021 memiliki pertumbuhan sebesar 5,61%. Pada tahun 2022 keseluruhan sektor ekonomi telah mengalami pertumbuhan positif, bahkan sektor Jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu mencapai 15,94%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling kecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05%. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan dimana salah satunya adalah adanya risiko ketidakpastian, selain itu dampak pandemi Covid-19 di masyarakat dalam beberapa tahun kedepan juga masih memerlukan perhatian dan melakukan langkah antisipasi agar pandemi yang pernah terjadi tidak terulang kembali, sehingga dengan demikian masih tetap diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2024 sampai tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasca Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dan mulai kembali pada kondisi normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Secara perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan berada pada angka 5,08% hingga 6,21%, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan adanya peningkatan pada angka 5,14% hingga 6,28%.

#### PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI



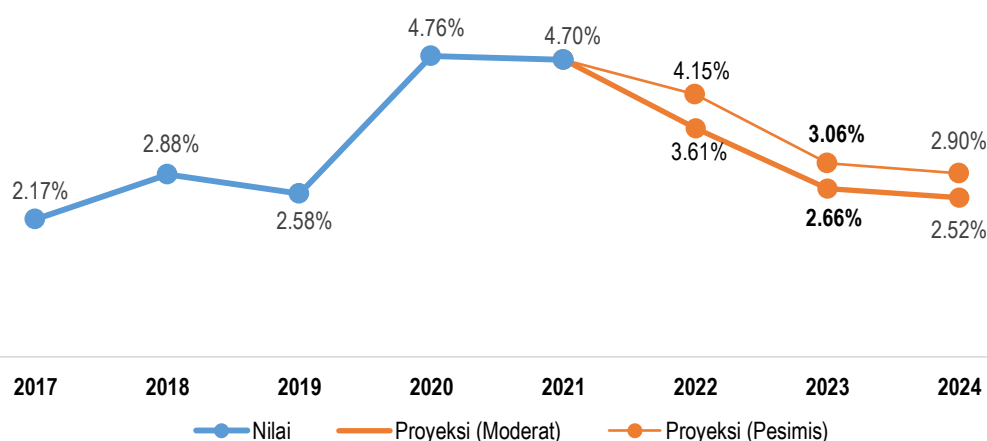
Prospek perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada beberapa tahun mendatang diperkirakan mulai menunjukkan adanya recovery, hingga akhirnya kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19. Seiring dengan mulai berangsur normalnya sebagian besar pergerakan aktivitas di masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2023 diproyeksi mencapai angka 4,98% hingga 5,85%.

#### PROYEKSI PERSENTASE KEMISKINAN



Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diketahui bahwa angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 3,19% hingga 3,60% pada tahun 2023.




#### PROYEKSI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat, diperkirakan sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis dan moderat dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan angka sebesar 2,66% hingga 3,06%.



Berdasarkan hasil proyeksi terhadap beberapa indikator ekonomi makro sebagaimana yang telah disajikan pada grafik di atas, maka sebagai gambaran perkiraan/ asumsi, serta target terhadap pertumbuhan ekonomi, persentase kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	<p>PERTUMBUHAN EKONOMI</p>	<p>Target Tahun 2023 <b>5,70%</b></p>
	<p>PERSENTASE KEMISKINAN</p>	<p>Target Tahun 2023 <b>3,59%</b></p>
	<p>TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA</p>	<p>Target Tahun 2023 <b>2,71%</b></p>

### 3.1.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Penentuan arah kebijakan perekonomian daerah tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan perekonomian yang tertuang dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 maupun terdapat pada RKP 2023, serta dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan (Tahun 2020 - 2024) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Pembangunan ekonomi dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Melihat pada keberadaan sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022, dengan memperhatikan pada hasil perhitungan Indeks LQ (Location Quotient), serta Tipologi Klassen dengan menitikberatkan pada besarnya peran/ kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi dalam struktur PDRB, maka terdapat 5 sektor ekonomi yang dapat menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai sektor utama/ penggerak pertumbuhan ekonomi, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Konstruksi; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur yang merata dan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) juga turut memberikan multiplier effect terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaan sektor pertanian dan perkebunan, perindustrian dan UMKM menjadi potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian kedepan. Potensi pertanian dan perkebunan dengan berbagai produk yang dihasilkan, terutama sawit perlu didorong untuk dapat meningkatkan nilai tambah hasil melalui hilirisasi dan inovasi, serta perlu adanya dukungan pada tahapan pra maupun pasca panen melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Pada bidang industri peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan, disamping adanya peningkatan kapasitas pengelolaan usaha dan pembangunan/ pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kotawaringin Barat, baik dalam bentuk sentra, Kawasan Keperuntukan Industri (KPI), maupun Kawasan Industri (KI) yang dapat disinergikan dengan tata ruang dan konsep green industry. Keberadaan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dikembangkan melalui pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM, penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor dengan memfasilitasi UMKM yang berorientasi ekspor.

#### A. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan strategi : (a) mempercepat pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (b) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (c) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (d) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; serta (e) mengembangkan industri pendukung EBT.
2. Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi : (a) memantapkan kawasan hutan berfungsi lindung; (b) mengelola hutan berkelanjutan; (c) menyediakan air untuk pertanian dan perikanan darat; (d) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (e) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; serta (f) mengembangkan waduk multiguna.
3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang dilaksanakan dengan strategi : (a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya

manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar; (d) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi; serta (e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan yang meliputi strategi: (a) menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (b) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (c) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (d) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil; serta (e) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water).

#### B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020 - 2024 mencakup:

1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi : (a) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (b) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (c) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (d) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (e) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi : (a) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (b) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (c) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (d) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (e) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (f) mengembangkan industri halal.

Industrialisasi secara umum dilaksanakan melalui : (a) peningkatan produktivitas; (b) penguatan rantai pasok atau nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output-distribusi, dan pengembangan pemasok; (c) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/ penolong dan barang jadi; (d) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesin

industri dan perluasan aktivitas industri di perdesaan; (e) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (f) penguatan jasa industri; (g) penguatan penerapan manajemen industri modern; (h) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (i) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri termasuk melalui pembiayaan industri.

Pengembangan hilirisasi industri pertanian dan kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, sagu, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah, pengembangan indikasi geografis tanaman jamu/ obat, serta standardisasi proses dan produk jamu nasional. Pengembangannya juga diperkuat dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, praktik budidaya pertanian berkelanjutan, dan agroforestry.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUS). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni.

3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi : (a) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (b) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (c) mengelola impor; (d) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (e) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (f) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (g) meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi : (a) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (b) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (c) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (d) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (e) reformasi fiskal; serta (f) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disusun, dimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026, pembangunan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan 1, yaitu: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif, dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah, Meningkatnya Daya tarik pariwisata, serta Meningkatnya kemandirian desa. Untuk mencapai



tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dapat dijalankan adalah dengan meningkatkan produktivitas sektor ekonomi melalui pengembangan sektor potensial (pertanian, industri, perdagangan), daya tarik pariwisata dan investasi, serta pengembangan potensi desa. Adapun beberapa arah kebijakan yang dapat dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melalui hilirisasi dan inovasi;
2. Peningkatan pemasaran produk pertanian, peternakan, dan perikanan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Industri;
6. Pembangunan Perwilayahan Industri dengan memperhatikan aspek lingkungan;
7. Pendampingan dan peningkatan kualitas produk UMKM;
8. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, serta penguatan ekspor;
9. Pengembangan destinasi pariwisata;
10. Menyelenggarakan event-event budaya dan pengembangan industri kreatif untuk mendukung pariwisata;
11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan;
12. Pemberdayaan ekonomi desa yang berorientasi pada potensi Lokal;
13. Pengembangan BUMDes.

Untuk menunjang pelaksanaan hilirisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didalamnya terdapat hasil perkebunan kelapa sawit sebagai komoditi andalan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu diperkuat dengan penyusunan dan penerapan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Sedangkan menurut PP Nomor 12 tahun 2022, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,



pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kepala daerah dalam melaksanakan kekuasaannya, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa pada sub bab Arah Kebijakan Keuangan Daerah membahas mengenai kondisi keuangan daerah yang didalamnya terdapat sumber-sumber pendanaan, juga akan membahas mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.


### **3.2.1. Kondisi Keuangan Daerah**

#### **A. Analisis Pendapatan Daerah**

##### **1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum menunjukkan tren yang positif pada 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 1.291.455.997.165,63 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, sehingga pada tahun tersebut jumlah realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 1.633.972.466.127,94. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar -13,53% yang disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai -11,41%. Sehingga pada tahun tersebut realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp. 1.412.954.168.584,52. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam dalam 2018 hingga 2022 tercatat sebesar 2,77%. Pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi Covid-19 kondisi realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan masih mampu bertahan dan bahkan menunjukkan adanya peningkatan. Dimana terjadinya peningkatan pada tahun 2020 banyak ditopang oleh adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 32,00%, khususnya dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, selain itu pertumbuhan pendapatan daerah juga ditopang oleh adanya peningkatan DAK Fisik dan Non Fisik yang secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 50,52%, Dana Intensif Daerah sebesar 187,58%, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 18,18%.



Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.9. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.291.455.997.165,63</b>	<b>1.357.377.147.401,90</b>	<b>1.449.011.596.895,94</b>	<b>1.633.972.466.127,94</b>	<b>1.412.954.168.584,52</b>	<b>2,77%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>179.785.920.666,73</b>	<b>170.185.828.808,34</b>	<b>224.651.929.841,28</b>	<b>392.164.379.004,55</b>	<b>233.165.264.534,65</b>	<b>15,17%</b>
1.1.1	Pajak daerah	61.675.813.242,39	51.527.738.156,10	64.838.822.752,80	70.389.757.706,05	81.575.790.318,70	8,46%
1.1.2	Retribusi daerah	11.425.818.845,25	13.532.547.717,00	13.208.556.926,00	12.611.932.516,30	15.782.458.937,00	9,17%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9.017.096.032,00	8.941.166.757,00	9.804.364.851,00	12.470.117.812,00	12.940.075.581,00	9,94%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	97.667.192.547,09	96.184.376.178,24	136.800.185.311,48	296.692.570.970,20	122.866.939.697,95	24,75%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.076.005.505.276,19</b>	<b>1.149.743.873.849,22</b>	<b>1.186.742.690.871,07</b>	<b>1.203.708.747.726,33</b>	<b>1.107.583.678.376,87</b>	<b>0,88%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>996.938.787.717,00</b>	<b>1.067.850.703.566,00</b>	<b>1.122.099.230.643,00</b>	<b>1.123.614.847.716,00</b>	<b>995.446.393.184,00</b>	<b>0,23%</b>
1.2.1.1	Dana Perimbangan	913.940.904.918,00	961.791.162.166,00	958.924.263.043,00	1.038.859.842.934,00	912.417.968.098,00	0,28%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	<i>91.442.582.698,00</i>	<i>96.734.933.706,00</i>	<i>64.383.434.319,00</i>	<i>135.229.818.254,00</i>	<i>138.520.194.506,00</i>	<i>21,20%</i>
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>652.906.913.000,00</i>	<i>670.997.942.000,00</i>	<i>602.446.484.000,00</i>	<i>593.260.006.000,00</i>	<i>591.800.383.800,00</i>	<i>-2,30%</i>
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>96.896.760.852,00</i>	<i>117.146.091.175,00</i>	<i>199.275.635.447,00</i>	<i>230.385.941.118,00</i>	<i>110.134.562.916,00</i>	<i>13,61%</i>
1.2.1.1.4	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik</i>	<i>72.694.648.368,00</i>	<i>76.912.195.285,00</i>	<i>92.818.709.277,00</i>	<i>79.984.077.562,00</i>	<i>71.962.826.876,00</i>	<i>0,66%</i>
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17.750.000.000,00	28.430.307.000,00	81.761.160.000,00	-	13.214.332.000,00	36,94%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	65.247.882.799,00	77.629.234.400,00	81.413.807.600,00	84.755.004.782,00	69.814.093.086,00	2,58%
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>79.066.717.559,19</b>	<b>81.893.170.283,22</b>	<b>64.643.460.228,07</b>	<b>80.093.900.010,33</b>	<b>112.137.285.192,87</b>	<b>11,60%</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	78.916.717.559,19	81.343.170.283,22	64.243.460.228,07	80.093.900.010,33	111.987.285.192,87	11,64%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	150.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00	-	150.000.000,00	34,85%
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>35.664.571.222,71</b>	<b>37.447.444.744,34</b>	<b>37.616.976.183,59</b>	<b>38.099.339.397,06</b>	<b>72.205.225.673,00</b>	<b>24,06%</b>
1.3.1	Hibah	32.623.510.509,71	37.062.444.744,34	37.161.976.183,59	-	25.124.419.000,00	-21,53%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3.041.060.713,00	385.000.000,00	455.000.000,00	38.099.339.397,06	47.080.806.673,00	2.056,97%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah pada tahun 2018 hingga 2022 maka dapat diketahui bahwa diantara 3 komponen pendapatan daerah, maka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat memiliki nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 24,06%. Selanjutnya pada posisi kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata pertumbuhannya tercatat sebesar 15,17%, sedangkan pada posisi ketiga adalah pendapatan transfer yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88%. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi. Tetapi pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam setiap tahunnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Khususnya pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 35.664.571.222,71, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 37.447.444.744,34. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 37.616.976.183,59. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kembali meningkat dengan pertumbuhan yang relatif besar sehingga menjadi Rp. 38.099.339.397,06 pada tahun 2021 dan Rp. 72.205.225.673,00 pada tahun 2022.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi setelah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu, sebesar 15,17%. Melihat pada nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2019 yang sempat menurun sebesar -5,34% dan 2022 yang mengalami penurunan sebesar -40,54%. Di tahun pertama yaitu pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar Rp. 179.785.920.666,73 dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi Rp. 224.651.929.841,28. Namun pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penurunan pada realisasi Pajak Daerah sebesar -16,45%, disamping Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali meningkat hingga pada tahun tersebut realisasinya tercatat menjadi Rp. 392.164.379.004,55. Namun Kembali mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi Rp. 233.165.264.534,65. Sedangkan satu komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling kecil pada angka 0,88%, dimana pertumbuhan tersebut lebih ditunjang oleh adanya pertumbuhan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, serta pada komponen Transfer Antar-Daerah.

## **2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal ini dapat diukur menggunakan skala interval. Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Berdasarkan perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah diperoleh nilai desentralisasi fiskal yang nilainya mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana nilai terendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 13,92 dengan kriteria “kurang”. Pada tahun 2019 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sehingga menjadi 12,54. Sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 nilai rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan menjadi sebesar 15,50 dengan status “kurang” dan 24,00 dengan status “sedang”. Pada tahun 2022 nilai rasio tersebut mengalami penurunan sehingga menjadi 16,50, namun nilainya masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun-tahun mendatang. Untuk mengetahui nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL					
Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	13,92	12,54	15,50	24,00	16,50
Kriteria	KURANG	KURANG	KURANG	SEDANG	KURANG

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Kemampuan desentralisasi fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat dalam waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya sehingga nilai desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendekati kriteria cukup hingga baik. Untuk mengetahui kriteria rasio derajat desentralisasi fiskal untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

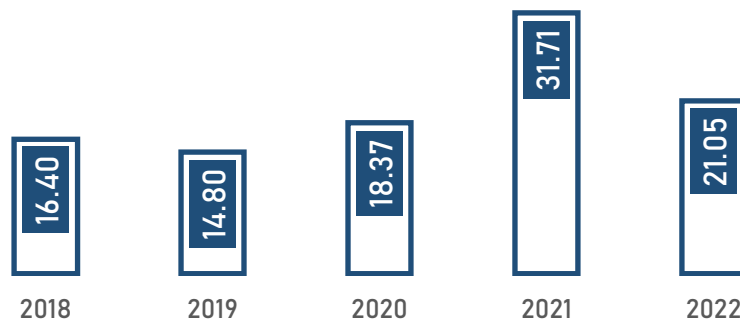
**Tabel 3.11. Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal**

No	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
1	0,00 - 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 - 20,00	Kurang
3	20,01 - 30,00	Sedang
4	30,01 - 40,00	Cukup
5	40,01 - 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik



### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, yaitu transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga kondisi tersebut juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Untuk dapat mengetahui perkembangan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.14. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)*

Adanya kecenderungan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun-tahun tertentu nilainya mengalami penurunan yaitu di tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2018 nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 16,40, dimana pada tahun 2019 nilai rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 14,80, dan akhirnya meningkat pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing tahun mencapai 18,37 dan 31,71. Pada tahun 2022 nilai rasio kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami penurunan, namun nilainya masih berada diatas realisasi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2020, yaitu mencapai 21,05. Nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2018 hingga 2020 dan pada tahun 2022 berkisar pada angka 0 - 25 yang jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan instruktif dalam membiayai urusan

pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki nilai rasio dengan kriteria yang rendah dengan range 25 - 50, dan memiliki pola hubungan yang konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Adapun kriteria penilaian terhadap rasio kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

### 3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Untuk melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	13,92%	12,54%	15,50%	24,00%	16,50%	16,49%
1.1.1.	Pajak daerah	4,78%	3,80%	4,47%	4,31%	5,77%	4,63%
1.1.2.	Retribusi daerah	0,88%	1,00%	0,91%	0,77%	1,12%	0,94%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,70%	0,66%	0,68%	0,76%	0,92%	0,74%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7,56%	7,09%	9,44%	18,16%	8,70%	10,19%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2	Pendapatan Transfer	83,32%	84,97%	81,90%	73,67%	78,39%	80,40%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	77,19%	78,93%	77,44%	68,77%	70,45%	74,50%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	70,77%	71,12%	66,18%	63,58%	64,58%	67,19%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	7,08%	7,13%	4,44%	8,28%	9,80%	7,35%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	50,56%	49,43%	41,58%	36,31%	41,88%	43,95%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	7,50%	8,89%	13,75%	14,10%	7,79%	10,36%
1.2.1.1.4	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik</i>	5,63%	5,67%	6,41%	4,90%	5,09%	5,54%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	1,37%	2,09%	5,64%	0,00%	0,94%	2,01%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	5,05%	5,72%	5,62%	5,19%	4,94%	5,30%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	6,12%	6,03%	4,46%	4,90%	7,94%	5,89%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6,11%	5,99%	4,43%	4,90%	7,93%	5,87%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,01%	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%	0,02%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,76%	2,76%	2,60%	2,33%	5,11%	3,11%
1.3.1	Hibah	2,53%	2,73%	2,56%	0,00%	1,78%	1,92%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,24%	0,03%	0,03%	2,33%	3,33%	1,19%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel proporsi sumber-sumber pendapatan di atas maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 - 2022 paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer yang memiliki rata-rata proporsi lebih dari 50%, yaitu sebesar 80,40%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi sebesar 16,49%. Sisanya sebesar 3,11% berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun memiliki rata-rata proporsi yang paling besar diantara 3 komponen Pendapatan Daerah, akan tetapi besaran proporsi Pendapatan Transfer memiliki kecenderungan menurun dengan titik tertinggi pada tahun 2019 sebesar 84,97% dan titik terendah pada tahun 2021 sebesar 73,67%. Proporsi Pendapatan Transfer yang besar paling banyak disumbang oleh Transfer dari Pemerintah Pusat dengan rata-rata selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 74,50%. Angka proporsi Transfer dari Pemerintah Pusat yang tinggi ini diperoleh dari tingginya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapatkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya, sehingga rata-rata proporsi DAU pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan angka 43,95% dan DAK sebesar 15,90%. Sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan sebagai komponen dari Transfer Pemerintah Pusat tidak pernah terealisasi dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah dan

Dana Desa pada tahun 2018 hingga 2022 rata-rata memiliki proporsi masing-masing sebesar 2,01% dan 5,30%. Transfer Antar Daerah memiliki sumbangsih terhadap Pendapatan Daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 5,89%.

Berbeda dengan proporsi pada Pendapatan Transfer, nilai proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2019 dan 2022. Dengan besar kontribusi sebesar 13,92% di tahun 2018 kemudian perlahan menurun hingga pada tahun 2021 menjadi 24,00% meskipun sempat menurun pada tahun 2022 pada angka 16,50%, namun nilai proporsinya masih lebih besar dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 hingga 2020. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari ke empat sumber tersebut, Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 10,19% dilanjutkan dengan pajak daerah yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 4,63%. Sedangkan sumbangsih terkecil dalam komponen PAD adalah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan yang pada setiap tahunnya memiliki kontribusi kurang dari 1%, yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 0,74%.

### Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 tahun terakhir secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14. Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Kinerja Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PENDAPATAN	98,97%	93,82%	99,32%	112,33%	98,56%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	90,06%	75,14%	102,74%	157,37%	82,20%
1.1.1.	Pajak daerah	87,88%	67,05%	93,43%	86,87%	83,97%
1.1.2.	Retribusi daerah	63,69%	63,36%	87,81%	52,16%	56,27%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	94,97%	99,78%	100,00%	100,16%	99,77%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	95,74%	80,61%	109,96%	225,54%	84,46%
1.2	Pendapatan Transfer	102,19%	97,77%	99,42%	104,26%	103,14%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	101,82%	98,85%	98,97%	104,86%	101,49%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	102,06%	98,81%	98,82%	105,34%	101,72%
1.2.1.1.1	<i>Dana Bagi Hasil</i>	131,16%	99,48%	90,33%	178,65%	122,70%
1.2.1.1.2	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	100,00%	99,69%	99,69%	100,00%	99,74%
1.2.1.1.3	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	98,71%	95,92%	97,46%	97,18%	98,13%
1.2.1.1.4	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non - Fisik</i>	97,30%	95,00%	102,75%	99,77%	91,72%

No	Uraian	Kinerja Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	99,09%	98,95%	99,79%	99,36%	98,84%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	107,03%	85,55%	107,93%	96,50%	120,48%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	107,04%	85,34%	107,99%	96,50%	120,52%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	100,00%	137,50%	100,00%	-	100,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	68,12%	84,57%	80,77%	74,80%	94,87%
1.3.1	Hibah	84,05%	84,60%	80,52%	-	95,58%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	22,45%	81,74%	108,33%	74,80%	94,49%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2018 perbandingan realisasi Pendapatan Daerah dengan anggaran Pendapatan daerah menunjukkan angka sebesar 98,97%. Kemudian pada tahun 2019 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 93,82% dari yang dianggarkan. Kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat pada tahun 2020 menjadi 99,32% dan kembali meningkat hingga menjadi 112,31% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 kinerja realisasi pendapatan daerah menurun menjadi 98,56%.

Nilai kinerja dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki tren hasil kinerja yang fluktuatif. Berbeda dengan tren yang muncul pada perhitungan kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Pendapatan Transfer pada tahun 2019 kinerjanya sedikit menurun dari tahun 2018, yaitu dari 102,19% menjadi 97,77%, sedangkan pada tahun 2020 kinerja Pendapatan Transfer meningkat menjadi 99,42%, hingga pada tahun 2021 dan 2022 tingkat realisasinya mengalami peningkatan dan berada pada posisi diatas 100%, yaitu sebesar 104,26% dan 103,14%.

Capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah tertinggi tercatat sebesar 157,37% yang terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2018 capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 98,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2019, sehingga tingkat capaian pada kedua tahun tersebut masing-masing menjadi 75,14%. Angka 75,14% merupakan nilai kinerja terendah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah dapat meningkat menjadi nilai kinerja hingga diatas 100% pada tahun 2020 yaitu sebesar 102,74%, nilai kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 157,36%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terkait dengan tingkat capaian, maka kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori baik, dimana selama 2 tahun berturut-turut telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan (>100%).



Namun pada tahun 2022 kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan adanya penurunan sehingga menjadi 82,20%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan dengan nilai kinerja paling rendah diantara 2 komponen lainnya. Nilai terendah dari kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berada pada angka 68,12% yang terjadi pada tahun 2018. Sedangkan kinerja tertinggi yang dapat dicapai adalah 84,57% yang terjadi pada tahun 2019. Rendahnya nilai kinerja pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan capaian kinerja pada masing-masing komponennya yang juga rendah. Selain komponen pada tahun tertentu yang tidak terdapat anggaran ataupun realisasi, maka kinerja secara umum menunjukkan angka dibawah 100% anggaran, terkecuali pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tahun 2020 dengan kinerja sebesar 108,33%. Tahun 2022 merupakan tahun pencapaian kinerja tertinggi untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat capaian sebesar 94,87%.

## **B. Analisis Belanja Daerah**

### **Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam Belanja Daerah terdapat beberapa komponen yaitu adalah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Berdasarkan data pada tabel realisasi belanja daerah dapat diketahui bahwa secara keseluruhan perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai sebesar 2,16%. Tingkat pertumbuhan realisasi untuk masing-masing jenis belanja daerah sangat beragam. Belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah Belanja Bantuan Hibah, dengan rata-rata sebesar 27,90%. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan realisasi belanja Hibah yang sangat signifikan pada tahun 2021 yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Belanja dengan pertumbuhan terendah dalam beberapa tahun terakhir adalah belanja modal tanah yang jumlahnya semakin menurun dalam 2 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar -39,54%. Bila melihat pada keempat jenis belanja maka dapat diketahui bahwa belanja operasi selama 5 tahun terakhir memiliki rata-

rata pertumbuhan tertinggi diantara jenis belanja lainnya, yaitu sebesar 5,03%, selain itu belanja transfer juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 1,27%. Untuk belanja modal dan tak terduga dalam setiap tahunnya sangat fluktuatif, dan pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir cenderung minus/ menurun dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar -3,62% dan -3,98%.

Realisasi belanja terbesar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah belanja pegawai. Pada tahun 2018 belanja pegawai mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 441.908.290.150,00, sedangkan pada tahun 2019 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 482.596.403.755,50. Pada tahun 2020 belanja pegawai menunjukkan penurunan, lebih rendah dari realisasi pada tahun sebelumnya sehingga mencapai sebesar Rp. 441.025.705.448,00, dan pada tahun 2021 belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mengalami peningkatan sehingga mencapai sebesar Rp. 533.721.133.775,48. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah belanja pegawai pada tahun 2021 selain untuk memenuhi kenaikan gaji dan tunjangan juga disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai, khususnya yang dihasilkan dari seleksi CASN pada tahun 2019. Pada tahun 2022 belanja pegawai kembali mengalami peningkatan sehingga tercatat sebesar Rp. 573.130.613.844,05. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mencapai sebesar 7,48%.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1.295.469.781.234,21	1.391.688.791.559,60	1.442.474.017.840,80	1.461.583.803.894,41	1.406.360.041.770,05	2,16%
2.1	Belanja Operasi	807.645.989.969,09	873.780.401.338,31	858.901.457.730,67	886.809.604.687,83	979.000.422.361,05	5,03%
2.1.1	Belanja Pegawai	441.908.290.150,00	482.596.403.755,50	441.025.705.448,00	533.526.478.475,48	573.130.613.844,05	7,25%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	330.018.703.992,41	381.938.443.234,81	407.431.358.282,67	331.364.771.908,23	377.813.967.646,00	4,44%
2.1.3	Belanja Bunga	-	280.000.007,00	-	847.000.000,00	563.499.999,00	-33,37%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	34.088.745.826,68	7.804.054.341,00	7.351.394.000,00	19.304.426.304,12	25.467.140.872,00	27,90%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.630.250.000,00	1.161.500.000,00	3.093.000.000,00	1.766.928.000,00	2.025.200.000,00	27,32%
2.2	Belanja Modal	340.758.782.140,12	357.837.690.237,29	377.005.194.475,77	413.698.499.168,58	270.563.145.420,00	-3,62%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	358.789.800,00	346.517.905,00	415.506.760,00	100.900.000,00	1.061.200,00	-39,54%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.845.154.459,20	54.893.662.839,22	97.622.948.332,00	69.514.111.613,00	75.253.218.392,00	18,01%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.378.659.526,67	132.223.414.395,24	143.482.401.078,77	171.955.314.980,00	89.604.333.064,00	5,14%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.391.047.684,25	154.912.088.124,43	125.882.549.773,00	167.205.556.475,58	102.987.368.793,00	-10,63%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.759.877.730,00	10.951.107.223,40	4.759.374.090,00	4.922.616.100,00	2.717.163.971,00	-1,95%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.025.252.940,00	4.510.899.750,00	4.842.414.442,00	-	-	-10,89%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	-	49.260.669.634,36	1.547.938.856,00	2.800.989.203,00	-3,98%
2.4	Belanja Transfer	147.065.009.125,00	160.070.699.984,00	157.306.696.000,00	159.527.761.182,00	153.995.484.786,00	1,27%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.174.154.300,00	6.423.330.300,00	7.740.424.700,00	7.632.280.400,00	10.267.531.800,00	8,05%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	138.890.854.825,00	153.647.369.684,00	149.566.271.300,00	151.895.480.782,00	143.727.952.986,00	1,04%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023

## Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pembiayaan prioritas pembangunan yang dialokasikan pada belanja daerah seharusnya bisa digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengingat dengan adanya desentralisasi fiskal maka keuangan pemerintah daerah sangat terbatas serta mengurangi ketergantungan dengan bantuan pemerintah pusat. Agar pengelolaan belanja daerah dapat berjalan baik, lancar dan efisien maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan uang publik apakah sudah secara efisien, efektif dan ekonomis. Sumber belanja daerah mencakup 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.16. Proporsi Sumber Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	62,34%	62,79%	59,54%	60,67%	69,61%	62,99%
2.1.1	Belanja Pegawai	34,11%	34,68%	30,57%	36,50%	40,75%	35,32%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25,47%	27,44%	28,25%	22,67%	26,86%	26,14%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,04%	0,02%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	2,63%	0,56%	0,51%	1,32%	1,81%	1,37%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,13%	0,08%	0,21%	0,12%	0,14%	0,14%
2.2	Belanja Modal	26,30%	25,71%	26,14%	28,30%	19,24%	25,14%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,69%	3,94%	6,77%	4,76%	5,35%	4,90%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,29%	9,50%	9,95%	11,76%	6,37%	8,97%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14,62%	11,13%	8,73%	11,44%	7,32%	10,65%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,44%	0,79%	0,33%	0,34%	0,19%	0,42%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,23%	0,32%	0,34%	0,00%	0,00%	0,18%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	3,42%	0,11%	0,20%	0,74%
2.4	Belanja Transfer	11,35%	11,50%	10,91%	10,91%	10,95%	11,12%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,63%	0,46%	0,54%	0,52%	0,73%	0,58%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	10,72%	11,04%	10,37%	10,39%	10,22%	10,55%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

Melihat pada data proporsi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar didominasi oleh belanja operasi khususnya pada belanja pegawai yang pada tahun 2018 hingga 2022 memiliki rata-rata proporsi sebesar 35,32%, kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar 26,14% sehingga belanja operasi tercatat sebagai porsi alokasi

belanja terbesar dengan total mencapai 62,99%. Persentase proporsi belanja operasi mendominasi belanja daerah setengah lebih dari total belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal memiliki alokasi/ porsi pada tahun 2018 hingga 2022 dengan rata-rata sebesar 25,14% dan belanja transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 11,12%. Kemudian alokasi/ porsi belanja terkecil terdapat pada belanja tidak terduga karena hanya memiliki rata-rata proporsi pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,74%. Komposisi pada belanja modal sebagian besar digunakan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal gedung dan bangunan yang masing-masing memiliki rata-rata proporsi pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 10,65% dan 8,97%.

### **Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah**

Analisis kinerja realisasi Belanja Daerah dirumuskan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu.

Berdasarkan data kinerja realisasi belanja dapat diketahui bahwa kinerja capaian belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2021 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 95,57%. Nilai rasio pada tahun 2021 ini merupakan puncak dari peningkatan rasionya selama 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 rasionya capaian belanja daerah mencapai 93,95%, sedangkan pada tahun 2019 nilai rasio capaian mengalami penurunan sehingga mencapai 92,81%. Pada tahun 2020 tingkat capaian belanja daerah mengalami peningkatan hingga mencapai rasio 94,14% pada tahun 2020, sampai pada akhirnya meningkat kembali di tahun 2021 hingga mencapai rasio 95,57%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu beberapa tahun (2018 - 2021), semakin baik dalam pemenuhan target/ anggaran yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2022 tingkat capaian belanja daerah mengalami penurunan hingga mencapai 89,97%, dan merupakan tingkat capain terendah selama 5 tahun terakhir.

Bila melihat pada keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata untuk masing-masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi berada di atas 80%, namun kondisi tersebut berbeda dengan belanja tidak terduga, dimana tingkat capaian tertinggi hanya sebesar 75,79%, 48,37%, dan 83,86% yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, mengingat pada tahun tersebut penggunaan belanja tidak terduga sangat banyak dalam rangka menunjang penanganan Covid-19, selain itu karakteristik belanja tidak terduga memang difungsikan sebagai pos belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga dengan demikian tingkat realisasinya sulit untuk dioptimalkan. Untuk melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.17. Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Kinerja Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	BELANJA	93,95%	92,81%	94,14%	95,59%	89,97%
2.1	Belanja Operasi	92,35%	91,23%	93,58%	94,19%	89,36%
2.1.1	Belanja Pegawai	95,13%	96,54%	95,35%	97,66%	88,64%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88,88%	85,30%	92,06%	91,33%	92,86%
2.1.3	Belanja Bunga	-	93,33%	-	100,00%	100,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	94,20%	92,94%	86,33%	65,27%	64,49%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	66,60%	79,66%	73,21%	92,35%	99,91%
2.2	Belanja Modal	96,95%	96,79%	96,95%	98,18%	89,21%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	65,56%	39,60%	61,47%	100,00%	1,92%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,39%	88,57%	92,19%	93,97%	95,02%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95,80%	98,11%	98,50%	98,48%	98,36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98,99%	99,25%	99,67%	99,67%	79,24%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77,56%	95,53%	88,31%	99,79%	91,73%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	86,39%	99,44%	97,68%	-	-
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	75,79%	48,37%	83,86%
2.4	Belanja Transfer	96,72%	93,58%	97,93%	97,88%	95,63%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	80,26%	62,34%	86,10%	72,55%	75,08%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	97,91%	95,58%	98,63%	99,64%	97,53%

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023 (data diolah)

### Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mendefinisikan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, dan/ atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 yang diperoleh, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,34%. Rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan yang memiliki nilai paling besar yaitu terdapat pada SiLPA sebesar 46,55%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 115.614.255.080,19, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 120.684.471.011,61, pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar Rp. 59.479.771.371,23, dan pada tahun 2021 SiLPA Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar Rp. 97.531.350.426,37. Sedangkan pada tahun 2022 keberadaan SiLPA mengalami peningkatan yang signifikan mencapai nilai Rp. 261.920.012.659,90. Semakin berkurangnya SiLPA pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana lain semakin akurasinya dalam melakukan perencanaan, semakin kecil SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin sedikitnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain, sehingga pelaksanaan belanja daerah berjalan secara optimal. Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah selama 3 tahun, yaitu di tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 20.000.000.000,00, pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 33.000.000.000,00. Pada tahun 2018 hingga 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat masih menerima Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya dengan nilai yang beragam. Sedangkan untuk pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan 0% karena tidak ada realisasi setiap tahunnya.

Untuk pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 225,24%, dimana pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang hanya terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000.000,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 36.000.000.000,00, serta pada tahun 2022 sebesar Rp. 33.000.000.000,00. Serta Penyertaan Modal Daerah yang terealisasi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan yang berfluktuasi hingga mencapai 34,66%. Adapun data terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: